

T E S I S

**STUDI JANGKAUAN PELAYANAN PUSAT PEMBANGUNAN
DI KOTA PALOPO TERHADAP WILAYAH HINTERLAND**

OLEH :

NURKALBIH RAMADHANI YUSUF

Nomor Induk MPW 45 14 003



**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

TESIS

**STUDI JANGKAUAN PELAYANAN PUSAT PEMBANGUNAN
DI KOTA PALOPO TERHADAP WILAYAH HINTERLAND**

***STUDY OF DEVELOPMENT CENTER SERVICE REACH IN THE CITY OF
PALOPO TO THE HINTERLAND AREA***



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

TESIS

STUDI JANGKAUAN PELAYANAN PUSAT PEMBANGUNAN
DI KOTA PALOPO TERHADAP WILAYAH HINTERLAND

Disusun dan Diajukan oleh
NURKALBIH RAMADHANI YUSUF
Nomor Induk MPW 45 14 003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal **13 Februari 2018**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

UNIVERSITAS

BOSOWA

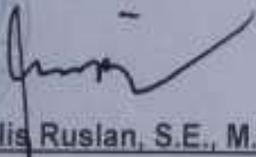

Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.
Ketua

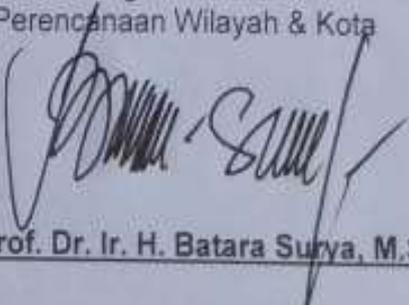

Dr. Ir. Muh. Iqbal S Suhaeb, S.E., M.T.
Anggota

Mengetahui

Direktur PPs Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah & Kota


Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si

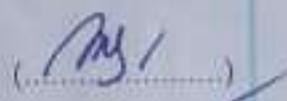

Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2018
Tesis : Studi Jangkauan Pelayanan Pusat Pembangunan di Kota
Palopo Terhadap Wilayah Hinterland
Nama : NURKALBIH RAMADHANI YUSUF
Nomor Induk : MPW 45 14003

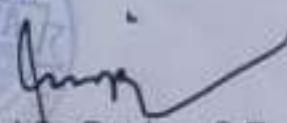
Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T. (Pembimbing 1) 
Sekretaris : Dr. Ir. Muh. Iqbal S Suhaeb, S.E., M.T. (Pembimbing 2) 
Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. Tommy S.S Eisenring, M.Sc 
2. Dr. Ir. Syafri, M.Si 

Makassar, 13 Februari 2018

Direktur PPs Universitas Bosowa


Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si
NIDN. 09 3108 6501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah karya saya sendiri tidak pernah diajukan untuk memperoleh/mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan, selain secara tertulis diakui dalam karya ilmiah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata mengandung unsur duplikasi (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Perencanaan dengan penuh rasa tanggung jawab

Makassar, Februari 2018



NURKALBIH RAMADHANI YUSUF

Abstract

Nurqalbih Ramadhani Yusuf: Master Program of Urban and regional planning Postgraduate of Bosowa University. **Study on the Reach of the Services of the Regional Development Centers in Palopo City toward Hinterland Region.** Counselor: Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T., Member: Dr. Ir. Iqbal Suhaeb, S.E., M.T.

This study aims to examine and analyze the size of the population and service functions of development areas in Palopo City towards hinterland. This study using quantitative approach with guttman scale analysis tool to know the hierarchy determination of development centers and the analysis of the law of gravity to know the reach of the region can know the determination of service function of development area centers in Palopo City towards hinterland. The results of the analysis and discussion of the size of the population and the function of the service, if observed based on function and type of facilities, the functions of services, trade, industry, education, health, entertainment, government, warehousing, transportation, tourism and recreation, and public services. This provides information that Palopo City, Luwu Regency, North Luwu Regency and East Luwu Regency have the same ability to attract various community activities in their respective regions. Judging from the extent of the area of influence of Palopo City - Luwu Regency with the distance of the tensile boundary that is owned only reaches on radius as far as 25.37 km. Influence of Palopo City – North Luwu Regency with the distance of the tensile boundary that is owned only reach Luwu Utara Regency on radius as far as 67,67 km. While the width range of the city of Palopo - East Luwu with the distance of the tensile boundary that is owned only reach the North Luwu Regency on a radius as far as 94.30 km. The bigger the radius between Palopo City and East Luwu Regency, the closer the interaction between the development center and the surrounding area.

Keywords : *Service Coverage, Service Function, Development Center*

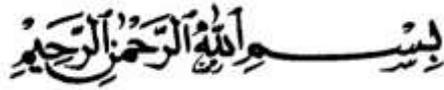
ABSTRAK

Nurqalbih Ramadhani Yusuf: Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Bosowa. **Studi Jangkauan Pelayanan Pusat Pembangunan Daerah Di Kota Palopo Terhadap Wilayah Hinterland** (dibimbing oleh Murshal Manaf dan Iqbal S Suhaeb).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisa besarnya penduduk dan fungsi pelayanan dan jangkauan wilayah dapat mempengaruhi penetapan fungsi pelayanan pusat-pusat wilayah pembangunan di Kota Palopo terhadap hinterland. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis skala guttman untuk mengetahui penetapan hirarki pusat-pusat pembangunan dan analisa hukum gravitasi untuk mengetahui jangkauan wilayah dapat mempengaruhi penetapan fungsi pelayanan pusat-pusat wilayah pembangunan di Kota Palopo terhadap hinterland. Hasil analisis dan pembahasan, Kota Palopo (81,81%) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) masih relatif lemah, yang artinya fungsi Kota Palopo hingga saat ini belum optimal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau kawasan perkotaan yang berfungsi melayani skala/cakupan regional. kondisi fakta dilapangan menunjukkan bahwa daerah hinterland wilayah Kota Palopo meliputi Kab. Luwu, Kab. Luwu timur, dan Kab. Luwu Utara kecenderungan berkembang pusat-pusat pelayanan untuk melayani skala regional wilayah masing-masing sehingga skala pengaruh pusat pelayanan utama Kota Palopo tidak begitu memberikan pengaruh terhadap daerah sekitar. Sehingga setiap pusat pengembangan relatif akan tumbuh dan berkembang secara kohesif. Kondisi seperti ini dalam pengalokasian sumber-sumber pembangunan pada struktur ruang menjadi tidak efisien. Dilihat luas jangkauan wilayah pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau pada radius sejauh 25,37 Km. Pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu Utara dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 67,67 Km. Sedangkan Luas Jangkauan Kota Palopo – Luwu Timur dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 94,30 Km. Semakin besar angka radius antar Kota Palopo dengan Kab. Luwu Timur maka semakin erat hubungan interaksinya antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya.

Kata kunci : Jangkauan Pelayanan, Fungsi Kota, Pusat Pembangunan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kelancaran serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberi nikmat kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul ”**Studi Jangkauan Pelayanan Pusat Pembangunan Di Kota Palopo Terhadap Wilayah Hinterland**”. Tesis ini merupakan persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Bosowa Makassar. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih:

1. Bapak **Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T**, selaku Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Ir. Iqbal Suhaeb, S.E., M.T.** selaku Pembimbing II yang penuh kearifan, ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam meluangkan waktu memberikan petunjuk dan bimbingan dari awal sampai akhir selesainya tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Tommy S.S. Eisenring, M.Si** dan Bapak **Dr. Ir. Syafri, M.Si**, selaku penguji I dan Penguji II yang penuh dengan kearifan, ketulusan dan kesabaran dalam memberikan petunjuk dari awal sampai akhir selesainya tesis ini.
4. Bapak **Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si** Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Terkhusus kepada kedua orangtua saya, ayahanda **Yusuf Tawe, S.Pd** dan ibunda **Kasmawati, S.** Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat, motivasi dan bantuan materil yang sangat besar yang tak dapat ananda ukur.
6. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf** pada Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
7. Teman-teman Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa Makassar Angkatan 2014 yang telah membantu dalam menyelesaikan studi ini khususnya dalam survey lapangan.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, demi penyempurnaan tulisan ini penulis berharap masukan, saran maupun kritik demi kesempurnaan penulis berikutnya.

Makassar, Februari 2018

PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Lingkup Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Pusat Pertumbuhan	8
B. Teori Pengembangan Wilayah	19
C. Transformasi Wilayah Peri Urban.....	26
D. Penelitian Relevan.....	28
E. Kerangka Pikir	40
F. Hipotesis	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Fokus dan <i>Locus</i> Penelitian	46
B. Waktu Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Variabel Penelitian	50
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo	58
B. Pembahasan Masing-masing Fungsi Pelayanan	69

BAB V ANALISA

A. Fungsi Pelayanan Pusat	80
B. Penjelasan Masing-Masing Indikator	81
C. Skala Guttman	92
D. Luas Jangkauan Wilayah Pengaruh Pusat-pusat Pelayanan	95
D. Implikasi Temuan Teori	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Rekomendasi	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Road Map Penelitian Sejenis	31
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Pelaksanaan Penelitian	47
Tabel 3.2 Kebutuhan Data Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara	59
Tabel 4.2 Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota	60
Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk	64
Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Kota Palopo	65
Tabel 4.5 Penggunaan Lahan Kota Palopo	66
Tabel 4.6 Administrasi Pemerintahan	69
Tabel 4.7 Fasilitas Jasa Perbankan dan Keuangan.....	70
Tabel 4.8 Fasilitas Perdagangan.....	71
Tabel 4.9 Fasilitas Pendidikan	72
Tabel 4.10 Fasilitas Kesehatan.....	73
Tabel 4.11 Fasilitas Pelayanan Umum.....	73
Tabel 4.12 Fasilitas Transportasi	76
Tabel 4.13 Fasilitas Wisata, Rekreasi dan Penunjang Pariwisata.....	77
Tabel 4.14 Fasilitas Hiburan	77
Tabel 4.15 Fasilitas Industri	78
Tabel 4.16 Fasilitas Pergudangan	79
Tabel 5.1 Kriteria/Parameter Fungsi Pelayanan.....	81

Tabel 5.2 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Pemerintahan	82
Tabel 5.3 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Jasa	83
Tabel 5.4 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Perdagangan Berdasarkan Fasilitas Perdagangan	83
Tabel 5.5 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Pendidikan berdasarkan Fasilitas Pendidikan	84
Tabel 5.6 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Kesehatan	85
Tabel 5.7 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Pelayanan Umum	86
Tabel 5.8 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Transportasi Berdasarkan Jenis Fasilitas Transportasi	87
Tabel 5.9 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Wisata dan Rekreasi	88
Tabel 5.10 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Hiburan Berdasarkan Fasilitas Hiburan	89
Tabel 5.11 Nilai Skalogram Indeks sentralitas Fungsi Indutri Berdasarkan Jenis Industri	90
Tabel 5.12 Nilai Skalogram Indeks sentralitas Fungsi Pergudangan Berdasarkan Jumlah Pergudangan	91
Tabel 5.13 Distribusi Fungsi Pelayanan Pusat Pengembangan Berdasarkan Skala Guttman	93
Tabel 5.14 Matriks Jarak (Km) dan Jumlah Penduduk (Jiwa) Antar Pusat Pembangunan	95
Tabel 5.15 Matriks Interaksi Kota Palopo Terhadap Hinterland	96
Tabel 5.16 Jangkauan Wilayah Pengaruh Kota Palopo terhadap Hinterland	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Daerah Inti dan Daerah Pinggiran.....	13
Gambar 2.2 Model Diagramatik Teori Land Use Triangle.....	22
Gambar 2.3 Kerangka Pikiran.....	43
Gambar 4.1 Pintu Perbatasan Kota Palopo	59
Gambar 4.2 Peta Administrasi	61
Gambar 4.3 Fasilitas Perdagangan.....	71
Gambar 4.4 Fasilitas Pendidikan.....	72
Gambar 4.5 Jaringan Jalan (Arteri, Kolektor, Lokal)	75
Gambar 5.1 Peta Interaksi Pusat Pelayanan Kota Palopo Terhadap Daerah Hinterland.....	98
Gambar 5.2 Peta Radius Jangkauan Pelayanan Kota Palopo Terhadap Daerah Hinterland	101
Gambar 5.3 Peta Tingkat Pelayanan Kota Palopo Terhadap Daerah Hinterland	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukaan wilayah kondisinya serba tidak sama (heterogen), ada wilayah dataran rendah dan ada wilayah dataran tinggi, ada wilayah subur dan ada wilayah yang tidak subur, ada daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kecenderungan lain memperlihatkan bahwa pembangunan tidak terjadi di seluruh tata ruang wilayah, sebaliknya terkonsentrasi hanya pada beberapa tempat. Pembangunan di daerah perkotaan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan di daerah pedesaan.

Kota besar atau yang relatif besar pada umumnya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Kota merupakan konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, yang didukung oleh tersedianya infrastruktur serta fasilitas pelayanan ekonomi dan pelayanan sosial. Makin besar suatu kota, makin banyak jumlah penduduknya, jenis dan kapasitas fasilitas pelayanan yang dimiliki. Fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan ada dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer suatu kota melayani kegiatan jasa distribusi (meliputi jasa perdagangan dan jasa transportasi) kota tersebut dengan kota-kota lain. Sedangkan fungsi sekunder suatu kota melayani kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi penduduk perkotaan. (Adisasmita, 2013 : 95).

Dalam pengembangan wilayah, selain fungsi kota (pusat pertumbuhan), terdapat hal penting lainnya yang harus mendapat perhatian yaitu hirarki kota (pusat). Sebagaimana dikatakan Walter Christaller (1933) pada teori tempat pusat, terdapat tiga unsur fundamental pengembangan wilayah, yaitu (1) adanya pusat, (2) memiliki wilayah pengaruh (wilayah pelayanan), dan (3) yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Lee (1979) dalam Yunus (2005 : 62) bahwa, pusat pelayanan merupakan faktor penarik terhadap penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan untuk datang ke arahnya. Makin banyak jenis dan macam pelayanan umum yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, maka akan makin besar daya tariknya terhadap penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan.

Dalam pembagian pusat – pusat kegiatan perkotaan dalam rencana tata ruang nasional (RTRW Nasional) dan Propinsi Sulawesi Selatan (RTRW Propinsi Sulawesi Selatan), Kota Palopo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat utama pengembangan kawasan andalan Kota Palopo dan sekitarnya. Pusat kegiatan wilayah (PKW) berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mampu melayani beberapa Kabupaten. Pusat – pusat wilayah pembangunan diharapkan dapat memberikan pelayanan pada Kabupaten I dan seterusnya, adapun Kabupaten yang dimaksud adalah Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur. Pusat wilayah pembangunan yang fungsi pelayanannya lebih besar umumnya memiliki fasilitas pelayanan yang lebih besar dan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Dengan ditetapkannya fungsi kota serta ciri-ciri fungsi pelayanan tiap pusat pembangunan didasarkan pada

pertimbangan potensi fungsi yang ada (seperti fungsi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan pelabuhan), serta kemampuan pengembangan fungsi pusat tersebut di masa akan datang. Semakin luas orientasi pelayanan setiap fungsi maka semakin besar potensi pengembangannya.

Dalam kenyataannya pada sistem hirarki dan jangkauan pelayanan, bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten hinterland, Kota Palopo memiliki tingkat kepadatan penduduk yang signifikan, dimana jumlah penduduk Kota Palopo berkisar 141.195 Jiwa dengan kepadatan penduduk 570,45 Jiwa/Km dengan luas wilayah 247,52 Km², Sedangkan Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk 358,292 Jiwa dan kepadatan penduduk 119,42 Jiwa/Km dengan Luas Wilayah 3.000,25 Km². Kabupaten Luwu Utara memiliki jumlah penduduk 326.405 Jiwa dan kepadatan penduduk 43,51 Km/Jiwa dengan luas wilayah 14.447,56 Km² dan Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah penduduk 234,248 Jiwa dan Kepadatan penduduk 33,73 Jiwa/Km dengan luas wilayah 6.944,98 Km². Makin besar fungsi pelayanan dan jenis atau macam pelayanan yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, maka makin besar daya tariknya terhadap penduduk dan fungsi kota.

Kendala utama Kota Palopo dalam menumbuh kembangkan suatu hirarki pada pelayanan adalah kondisi topografi yang cukup variatif. Disamping itu, Kota Palopo dan sekitarnya terdapat kantong – kantong yang dalam teori “tempat pusat” Christaller merupakan daerah yang secara jarak pengaruh tidak terjangkau oleh pusat – pusat pertumbuhan. Untuk mengurangi

ketimpangan antar wilayah dan tercapainya pemerataan pembangunan, maka perlu strategi pembangunan dengan pembentukan pusat – pusat pertumbuhan pada wilayah yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dengan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana bagi wilayah pengaruhnya.

Melihat isu – isu penting tersebut diatas, maka perlu dikaji mengenai hirarki dan luas jangkauan wilayah pengaruhnya terhadap keberadaan fasilitas saat ini. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat Judul tentang “**Studi Jangkauan Pelayanan Pusat Pembangunan Di Kota Palopo Terhadap Wilayah Hinterland**”.

B. Masalah Penelitian

Terdapat kecenderungan bahwa Kota Palopo yang merupakan sebagai Kota utama untuk Kabupaten hinterland (Kab. Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara) akan berkembang makin pesat sedangkan Kabupaten hinterland lainnya relatif lamban, maka dalam berbagai kegiatan pelayanan beberapa permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana hirarki pusat-pusat pelayanan di daerah Kota Palopo dan hinterland dilihat dari fungsi pelayanan?
2. Sejauh mana jangkauan pelayanan dapat memengaruhi penetapan fungsi pelayanan pusat-pusat wilayah pembangunan di Kota Palopo terhadap hinterland?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengkaji dan menganalisa hirarki pusat-pusat pembangunan di daerah Kota Palopo dan hinterland dilihat dari fungsi pelayanan.
2. Mengkaji dan menganalisis jangkauan pelayanan pengaruh pusat Kota Palopo terhadap daerah hinterland.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota, dan secara khusus sebagai konsistensi antara hirarki pusat pembangunan berdasarkan hirarki dan jangkauan pelayanan berdasarkan besarnya fasilitas dan fungsi pelayanan.

2. Aspek Guna Laksana

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi teman mahasiswa agar dapat memahami konsistensi antara hirarki dan jangkauan layanan berdasarkan besarnya penduduk dengan hirarki pusat pembangunan berdasarkan besarnya fungsi dan fasilitas pelayanan.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan, khususnya bagi yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

E. Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi dari penelitian ini adalah Kota Palopo sebagai pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan regional seperti Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur.

2. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini berada pada pengkajian dan menganalisis hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah di tinjau dari jangkauan layanan dan jumlah fungsi khususnya pada fasilitas sosial ekonomi di Kota Palopo dan sekitarnya (*Hinterland*), meliputi : fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan.

F. Sistematika Penulisan

❖ Bagian Pertama, **Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup wilayah Maupun ruang lingkup substansi, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

❖ Bagian Kedua, **Kajian Pustaka**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai definisi wilayah, hirarki kota, fungsi pusat pelayanan sosial ekonomi, dan pandangan-pandangan teoritis yang terkait dengan persoalan hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah di tinjau dari jangkauan layanan dan jumlah fungsi khususnya pada fasilitas sosial ekonomi di Kota Palopo dan sekitarnya (*Hinterland*) yakni teori

pusat pertumbuhan dan perkembangan perkembangan perkotaan. yang kemudian akan dirangkum untuk menurunkan proposisi-proposisi.

❖ Bagian Ketiga, **Metode Penelitian**

Pada bagian ini akan dideksripsikan mengenai Fokus dan *Locus* penelitian; Waktu Penelitian; Jenis dan Sumber Data; Metode Pengumpulan Data; Variabel Penelitian; Teknik Analisis; dan diakhiri oleh Definisi Operasional.

❖ Bagian Keempat, **Pembahasan**

Pada bagian ini akan dideksripsikan mengenai Gambaran Umum Kota Palopo; dan Pembahasan Masing – masing Fungsi Pelayanan.

❖ Bagian Kelima, **Analisa**

Pada bagian ini akan dideksripsikan mengenai Fungsi Pelayanan Pusat; Penjelasan Masing – masing Indikator; Luas Jangkauan Wilayah Pengaruh Pusat – pusat Pelayanan; Implikasi Temuan Teori.

❖ Bagian Keenam, **Penutup**

Pada bagian ini akan dideksripsikan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Pusat Pertumbuhan

1. Teori Tempat Sentral (*Central Palace Theory*)

Walter Christaller (1933) dalam Adisasmita (2013 : 75) mengemukakan bahwa evolusi hirarki perkotaan (*Urban Hierarchy*). Christaller menyusun suatu model wilayah berbentuk segi enam (*Hexagonal*). Dengan menggunakan jangkauan atau luas dari setiap pelayanan yang dinamakan *range* dan *threshold*.

- a. Prinsip pasar (marketing principle) $k=3$: pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya, seperti pasar, sering disebut kasus pasar optimal. Dinamakan $K=3$ (K3), karena suatu kegiatan di tempat pusat akan melayani 3 tempat pusat untuk fungsi di bawahnya yaitu 1 tempat pusat sendiri di tambah 2 tempat pusat hirarki di bawahnya.
- b. Prinsip lalu lintas (traffic principle) $k=4$: bagaimana meminumkan jarak penduduk untuk mendapatkan pelayanan fungsi di tempat pusat. Bersifat linier, karena tempat pusat berada pada titik tengah dari setiap sisi heksagon. Sehingga daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas paling efisien, sering disebut situasi lalu lintas yang optimum. Teori ini disebut sebagai $k=4$ karena 1 empat pusat melayani empat tempat pusat lain; 1 pada tempat pusatnya itu sendiri dan 3 dari tempat pusat lain.

- c. Prinsip administrasi (*administrative principle*) $k=7$: wilayah ini mempengaruhi wilayahnya sendiri dan seluruh bagian wilayah – wilayah tetangganya, prinsip utamanya adanya kemudahan dalam rentang kendali pengawasan pemerintahan, sehingga sering disebut situasi administratif optimum dimana keenam pusat hirarki di bawahnya berada pada batas wilayah pelayanan hirarki di atasnya.

Central Place Theory mengajukan 4 asumsi dasar:

- a. Semakin besar permukiman dalam jumlah, semakin sedikit jumlah mereka jadinya. Contoh: ada banyak desa-desa kecil, tetapi hanya sedikit kota-kota besar.
- b. Semakin besar permukiman tumbuh dalam jumlah, makin besar jarak antara mereka. Contoh: desa-desa biasanya saling berdekatan, tetapi kota-kota besar saling berjauhan dalam jarak.
- c. Begitu sebuah permukiman meningkat dalam ukuran, jangkauan dan jumlah fungsinya akan meningkat.
- d. Begitu suatu permukiman meningkat dalam ukuran, jumlah layanan, tingkat fungsi juga akan meningkat. Contoh: derajat spesialisasi yang lebih besar terjadi di dalam pekerjaan-pekerjaan.

Teori tempat pusat disebutkan oleh Walter Christaller (1933) dan August Losch (1936), beliau mengembangkan satu teori yang dapat dipergunakan sebagai kerangka analisis untuk membahas hal tersebut. Teori pusat merupakan suatu permukiman yang menyediakan barang dan jasa- jasa bagi penduduk local dan daerah belakangnya. Pada teori tempat

pusat juga menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara social – ekonomi dan fisik yang saling mempengaruhi. Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan, sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya (*hinterland*).

Sebagaimana dikatakan Walter Christaller (1933) pada teori tempat sentral, terdapat tiga unsur fundamental pengembangan wilayah, yaitu (1) adanya pusat, (2) memiliki wilayah pengaruh (wilayah pelayanan), dan (3) yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Tempat sentral (pusat) besar melayani perdagangan barang konsumsi kepada tempat-tempat sentral sedang dan kecil, sedangkan kebutuhan bahan baku tempat sentral besar disuplai oleh tempat sentral kecil.

2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1950 atas dasar pengamatan terhadap proses pembangunan. Perroux mengakui bahwa pembangunan tidak terjadi dimana-mana secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat itulah yang dinamakan titik-titik dan kutub-kutub pertumbuhan. Dari titik-titik dan kutub-kutub pertumbuhan itulah pembangunan akan menyebar melalui berbagai saluran dan mempunyai akibat akhir yang berlainan pada perekonomian secara keseluruhan.

Lebih jelas Perroux dalam Adisasmita (2009 : 33) menyatakan bahwa pembangunan ataupun pertumbuhan tidak terjadi pada seluruh tata ruang, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu. Tata ruang

diidentifikasi sebagai arean (medan) kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan ke dalam. Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan-perusahaan dan industri - Industri serta saling ketergantungannya, dan bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun secara inter. Pada dasarnya konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak.

Mengingat pengamatan di atas, teori ini menyarankan keperluan untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor kecil sebagai sektor kunci di beberapa tempat tertentu. Dalam memusatkan usaha pada sejumlah sektor dan tempat yang kecil diharapkan pembangunan akan menjalar pada sektor lain pada seluruh wilayah, dengan demikian sumber-sumber material dan manusia yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan lebih efisien. Jadi pada dasarnya teori kutub pertumbuhan menerangkan akibat dari sekelompok kesatuan-kesatuan yang memimpin atau karena polarisasi.

3. Teori Kutub Pembangunan (Boudeville)

Boudeville (1961) dalam Adisasmita (2013 : 77) mengemukakan bahwa kutub pembangunan sebagai seperangkat industri-industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong lebih lanjut perkembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya. Boudeville mengemukakan aspek kutub fungsional, tetapi ia memberikan pula perhatian pada aspek geografis.

Boudeville dianggap sebagai pelengkap terhadap teori tempat sentral yang diintroduksikan oleh Walter Christaller (1933), atau dapat dikatakan bahwa teori Boudeville telah menjembatani terhadap teori-teori spasial yang terdahulu, yang menekuni persoalan organisasi kegiatan manusia.

4. Teori Simpul Jasa Distribusi (Poernomosidi Hadjisarosa)

Seperti yang dikemukakan oleh Perroux (Teori Kutub Pertumbuhan), John Friedman (Teori daerah inti), dan Walter Christaller (Teori Tempat Sentral), maka Poernomosidi Hadjisarosa (Teori Simpul Jasa Distribusi, 1970-an) dalam Adisasmita (2013 : 80) mengemukakan bahwa pentingnya peranan pusat-pusat, yang selanjutnya diidentifikasi sebagai simpul jasa distribusi, yang biasa disebut “simpul” (pada umumnya adalah kota).

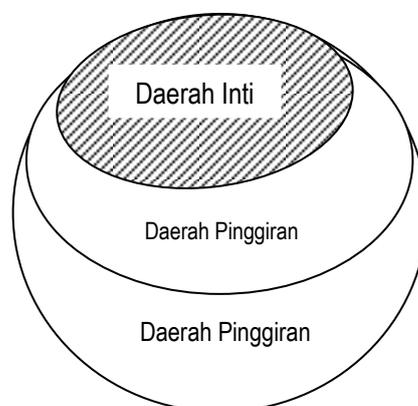
Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemahaman peranan simpul, yaitu mengenai fungsi simpul dan hirarki simpul dalam sistem spasial (tata ruang). Fungsi primer suatu simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangannya atau wilayah nasional (bersifat keluar), sedangkan fungsi sekundernya adalah pelayanan kehidupan masyarakat di simpul yang bersangkutan (bersifat ke dalam). Perbedaan fungsi simpul tersebut mencerminkan pula perbedaan dalam jenis dan kapasitas fasilitas yang tersedia di masing-masing simpul. Hirarki tiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan fungsional antar simpul yang dicerminkan berdasarkan mekanisme arus distribusi barang. Simpul orde distribusi I tidak berada dalam sub ordinasi simpul-simpul lain. Simpul-simpul orde distribusi II berada dalam sub ordinasi simpul orde

distribusi I, dan selanjutnya simpul-simpul orde distribusi III berada dalam sub ordinasi simpul orde distribusi II.

5. Teori Daerah Inti (*Core Region*) dan Daerah Pinggiran (*Periphery Region*)

John Friedmann (1964) dalam Adisasmita (2009 : 73) menganalisis aspek tata ruang, lokasi, serta persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedmann telah menampilkan teori daerah inti. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran. Daerah inti atau *core region* dan daerah pinggiran atau *periphery region*. Daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah pedalaman atau daerah di sekitarnya.

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu, tetapi bersifat kumulatif yang berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan ke luar dari pusat-pusat tersebut ke daerah-daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.



Gambar 2.1 Daerah Inti dan Daerah Pinggiran

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota besar, metropolis atau megapolis, yang dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Daerah inti dan daerah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial. Kemajuan pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga di daerah ini, bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial.

Proses daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah pinggiran yang terdiri dari pengaruh dominasi (menguatnya perekonomian di daerah inti sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya-sumberdaya alam, manusia dan modal ke daerah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan inovasi secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi, untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi (penciptaan dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam lingkup pembangunan perkotaan yang lebih terbatas atau tertentu).

Menurut Friedmann dalam Adisasmita (2009 : 76) pertumbuhan berasal dari pusat kota yang merupakan perubahan yang terletak pada titik interaksi yang mempunyai potensi interaksi tertinggi, pertumbuhan

cenderung menyebar ke luar dari pusat kota tersebut menuju ke daerah sekitarnya yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah (yaitu ke daerah pinggiran). Pertumbuhan dipandanginya sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi bersifat kumulatif.

6. Teori Polarisasi Ekonomi (*Polarization Economic Theory*)

Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut yang mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi (*polarization of economic growth*). Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat-pinggiran (*core periphery*). Konsep pusat-pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah perdesaan.

Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya adalah terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, serta penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatifnya disebut *backwash effect*.

Contohnya adalah adanya ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

7. Lee, Linda (1979)

Di dalam studinya Lee (1979) dalam Yunus (2005 : 60) mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap proses perkembangan ruang secara sentrifugal ini dan sekaligus akan mencerminkan variasi intensitas perkembangan ruang di daerah pinggiran kota. Keenam faktor tersebut ialah (a) faktor aksesibilitas (*accessibility*); (b) faktor pelayanan umum (*public services*); (c) karakteristik lahan (*land characteristics*); (d) karakteristik pemilik lahan (*land owners characteristics*); (e) keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur tata guna lahan (*regulatory measures*) dan (f) prakarsa pengembang (*developers initiatives*).

Faktor aksesibilitas mempunyai peranan yang besar terhadap perubahan pemanfaatan lahan, khususnya perubahan pemanfaatan lahan agraris menjadi non agraris di daerah pinggiran kota. Yang dimaksudkan dengan aksesibilitas dalam hal ini adalah aksesibilitas fisik. Dalam penjelasannya, Lee (1979) aksesibilitas fisik tidak lain merupakan tingkat kemudahan suatu lokasi dapat dijangkau oleh berbagai lokasi yang lain. Pengukuran aksesibilitas fisik dapat dilaksanakan dengan menilai prasarana transportasi yang ada bersama-sama dengan sarana transportasinya.

Faktor pelayanan umum merupakan faktor penarik terhadap penduduk dan fungsi-fungsi kota untuk datang ke arahnya. Makin banyak jenis dan macam pelayanan umum yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, maka akan semakin besar daya tariknya terhadap penduduk dan fungsi-fungsi kota. Pembangunan kampus pendidikan yang besar, sebagai contoh, akan diikuti pula oleh banyaknya pendatang baru baik sebagai mahasiswa maupun pegawai-pegawai institusi yang bersangkutan. Penduduk setempat baik asli maupun pendatang banyak yang memanfaatkan peluang bisnis baru untuk memperoleh tambahan penghasilan.

Faktor Karakteristik lahan tidak kalah pentingnya peranannya dalam mempengaruhi intensitas perkembangan baru di suatu kota. Memang diakui bahwa dari tempat yang satu sangat berbeda dengan tempat yang lain. Oleh karena sebagian besar bangunan baru di daerah pinggiran kota akan digunakan untuk permukiman maupun tempat mengakomodasikan prasarana penunjang kegiatan, maka lahan-lahan yang terbebas dari banjir, stabilitas tanahnya tinggi, topografinya relatif datar atau mempunyai kemiringan yang kecil, air tanahnya relatif dangkal, relatif mikronya tidak menyulitkan untuk pembangunan, drainasenya baik, terbebas dari polusi air, udara maupun tanah akan mempunyai daya tarik yang lebih besar terhadap penduduk maupun fungsi-fungsi lain kota dibandingkan dengan daerah yang skor komposit variabel karakteristik lahannya lebih rendah.

Faktor karakteristik pemilik lahan menentukan corak perkembangan spasial di sesuatu tempat, khususnya akselerasi intensitas perkembangannya. Pemilik lahan yang mempunyai status ekonomi kuat akan berbeda dengan pemilik lahan yang berstatus ekonomi lemah. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pemilik lahan yang mempunyai status ekonomi lebih lemah mempunyai kecenderungan lebih kuat untuk menjual lahannya dibanding dengan mereka yang mempunyai status ekonomi kuat (Yunus, 2005). Pemilik-pemilik lahan berekonomi lemah kebanyakan berasosiasi dengan pemilikan lahan yang sempit dan mereka inilah yang paling terpengaruh oleh meningkatnya harga lahan yang semakin tinggi, sementara itu upaya pengolahan lahannya tidak menguntungkan.

Faktor keberadaan peraturan yang mengatur tata ruang diyakini sebagai salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap intensitas perkembangan spasial di daerah pinggiran kota apabila peraturan yang ada dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Sinclair, 1967). Pada daerah tertentu dimana diberlakukan aturan yang membatasi pembangunan permukiman maupun pembangunan fisik lainnya karena wilayahnya telah ditentukan sebagai daerah terbuka hijau, maka selama peraturan yang ada dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen maka disana tidak akan terjadi perkembangan fisik yang berarti. Demikian pula hal dengan daerah pinggiran kota yang telah diperuntukan untuk menjadi pengembangan permukiman, walau daerahnya masih kosong, namun daerah tersebut akan

berkembang sebagai daerah permukiman di masa depan secara intens. Daerah ini akan mempunyai akselerasi perkembangan fisik yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang dilarang untuk perkembangan fisik baru.

Faktor prakarsa pengembang mempunyai peranan yang kuat pula dalam mengarahkan pengembangan spasial sesuatu kota. Oleh karena para pengembang selalu menggunakan ruang yang cukup luas maka keberadaan kompleks yang dibangun akan mempunyai dampak besar pula terhadap lingkungan sekitar. Pada daerah tertentu yang mungkin sebelum dibeli oleh pengembang merupakan lahan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat rendah, setelah dibeli dan dimanfaatkan pengembang untuk pembangunan kawasan permukiman elit dengan prasarana dan sarana permukiman yang lengkap dan baik, maka daerah yang bersangkutan akan berubah menjadi daerah yang sangat menarik pemukim-pemukim baru maupun bentuk kegiatan ekonomi. daerah semacam ini akan mempunyai akselerasi perkembangan spasial yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak dijamah oleh pengembang.

B. Teori-Teori Pengembangan Wilayah

1. Teori *Land Use Triangle*

Pryor (1971) dalam Yunus (2008) mengemukakan bahwa wilayah *peri urban* atas dasar parameter yang terukur, yaitu mengenai proporsi bentuk pemanfaatan lahan. Berdasarkan fakta empiris yang dikemukakan oleh para

peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik wilayah *peri urban* yang merupakan perpaduan antara karakteristik kekotaan dan karakteristik kedesaan muncul dalam ekspresi ekonomi, sosial, kultural dan spasial. Oleh karena disadari bahwa keberadaan kota sebagai salah satu kutub sifat kekotaan yang solid dan desa sebagai kutub lain yang mencerminkan sifat kedesaan yang solid merupakan batas terluar dari wilayah *peri urban* dan sementara itu keberadaan atribut sosial, ekonomi, kultural dan spasial tidak selalu koinsiden dalam ruang yang sama. Kemajuan penjalaran ide-ide, nilai-nilai, norma-norma kekotaan mampu menjangkau daerah yang relatif terisolir dalam artian fisik dan dalam beberapa hal telah mampu mengubah sifat kedesaan menjadi sifat semi kekotaan atau bahkan kekotaan sepenuhnya. Hal ini menurut Pryor (1971) dalam Yunus (2008) bahwa untuk menjelaskan keberadaan wilayah *peri urban* dari berbagai aspek kehidupan yang telah disebutkan adalah sangat sulit dibangun. Berdasarkan hal inilah kemudian Pryor (1971) dalam Yunus (2008) memunculkan idenya untuk memberikan pencerahan dalam mengenali wilayah *peri urban* dari segi bentuk pemanfaatannya.

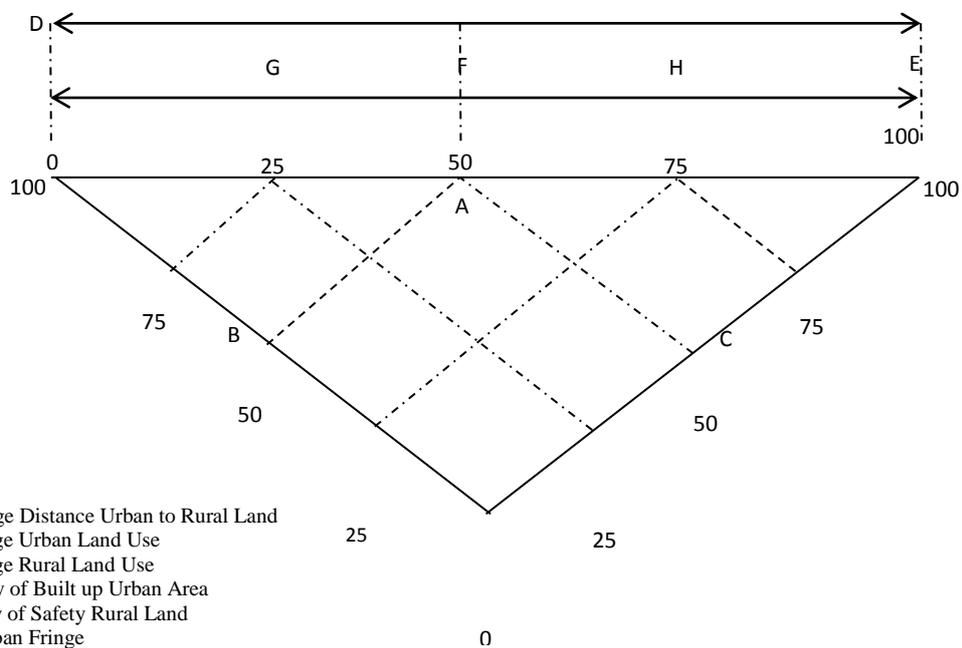
Walaupun demikian, Pryor (1971) dalam Yunus (2008) memberikan ciri-ciri kualitatif wilayah *peri urban* dari segi yang lain yaitu dari segi kepadatan permukiman, keberadaan fungsi-fungsi komersial, industrial, kepadatan penduduk, tingkat/ intensitas konversi lahan, kondisi *commuting*, keterkaitannya dengan lahan terbangun dan keberadaan lahan terlantar atau ditelantarkan/lahan kosong. Berdasarkan proporsi keberadaan lahan kekotaan

dan lahan kedesaan dapat diketahui mengenai struktur spasial wilayah *peri urban*.

Selanjutnya, struktur spasial wilayah *peri urban* menurut Pryor (1971) dalam Yunus (2008) dapat dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu *urban fringe* di satu sisi dan *rural fringe* di sisi yang lain. Sebagai suatu entitas, wilayah *peri urban* disebut juga *rural-urban fringe*, yang merupakan gabungan dari *rural fringe* di satu sisi dan *urban fringe* di sisi yang lain. Kenampakan wilayah dalam hal ini diartikan sebagai kenampakan fisik lahan (*landscape*) yang diaktualisasikan dalam bentuk pemanfaatan lahan. Bentuk pemanfaatan lahan adalah kenampakan fisik sebagai cerminan kegiatan manusia di atasnya dan hal ini adalah langkah awal dalam mengenali berbagai atribut wilayah yang berasosiasi dengan kenampakan fisik bentuk pemanfaatan lahan dimaksud seperti karakteristik demografis, kultural, ekonomi dan sosial. Atribut tersebut tidak selalu menunjukkan batas-batas yang koinsiden dengan batas-batas fisik bentuk pemanfaatan lahan, namun pada umumnya mempunyai jangkauan wilayah yang jauh lebih luas dan menunjukkan perubahan karakter yang sangat gradual. Dan sementara itu parameter demografis, ekonomi, kultural dan sosial bersifat sangat kualitatif dan bersifat non-fisikal sehingga menyulitkan identifikasi wilayahnya.

Berdasarkan fakta empiris, makin kearah lahan kotaan terbangun, makin intensif perubahan bentuk pemanfaatan lahan dari bentuk pemanfaatan lahan kedesaan menjadi bentuk pemanfaatan lahan kotaan dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena model diagramatik yang dikemukakan berwujud

segitiga bentuk pemanfaatan lahan, maka didalamnya memuat tiga dimensi penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi batas terluar dari masing-masing subzone. Tiga dimensi penilaian tersebut adalah (1) persentase jarak dari/ke batas 100% kenampakan kekotaan atau ke batas 100% kenampakan kedesaan; (2) persentase proporsi lahan kedesaan, dan (3) persentase proporsi lahan kekotaan (Gambar 3).



Gambar 2.2 : Model Diagramatik Teori Land Use Triangle
Sumber: Pryor (1971) dalam Yunus

2. Teori Kota Regional/ *Regional City*

Istilah kota regional memang agak asing kedengarannya bagi orang awam, karena belum sering digunakan dalam pembahasan mengenai studi kota. Istilah tersebut digunakan dalam hal mengacu peranan kota yang bersangkutan terhadap wilayah lahanburi (*hinterland*) yang secara langsung

menjalin keterkaitan fungsional dengan kota yang bersangkutan. Luas dan tidaknya pengaruh sesuatu kota tergantung pada beberapa hal antara lain (1) faktor historis; (2) faktor lokasi; (3) faktor aksesibilitas; (4) faktor lingkungan fisik dan (5) faktor transportasi dan komunikasi. Kelima faktor saling memengaruhi satu sama lain (Yunus, 2008).

Faktor historis terkait dengan umur kota serta perjalanan politik, sosial, ekonomi dari waktu ke waktu. Tidak semua kota-kota tua akan berkembang menjadi kota yang besar, namun bahkan menjadi kota-kota mati dan ada pula kota-kota yang umumnya relatif muda malah berkembang menjadi kota yang besar (Yunus, 2008).

Faktor lokasi sangat menunjang berkembangnya kota, misal kota yang terletak di tepi perairan yang dapat dilayari akan berbeda dengan kota pedalaman. Ada kota-kota yang mempunyai pelabuhan yang bagus akan mampu menjalin keterkaitan fungsional dengan wilayah lain yang jauh bahkan sampai manca negara dan hal ini berarti memperluas hinterland. Kesempatan untuk menjadi kota besar sangat terbuka bagi kota-kota seperti ini dan fakta empiris membuktikannya. Hampir semua kota-kota besar di dunia terletak di tepi perairan yang menciptakan pelabuhan-pelabuhan besar.

Faktor aksesibilitas menjanjikan terciptanya frekuensi hubungan antar-kota maupun dengan wilayah lain yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa makin tinggi aksesibilitas yang dimiliki sesuatu kota dalam kaitannya dengan daerah luar makin mobilitas barang, orang, jasa dan informasi antara kota yang bersangkutan dengan kota lain dan dengan wilayah lain. Hal ini sangat

berperan dalam perkembangan kota selanjutnya dalam artian bahwa makin tinggi aksesibilitas, makin tinggi pula kesempatan kota yang bersangkutan untuk berkembang menjadi lebih besar (Yunus, 2008).

Faktor lingkungan fisik sangat terkait dengan faktor aksesibilitas dan ketersediaan ruang untuk perkembangan selanjutnya. Lingkungan fisik yang menciptakan kendala-kendala alami terhadap aksesibilitas sangat menyulitkan kota yang bersangkutan untuk berkembang. Demikian pula halnya dengan tuntutan akan ruang yang semakin tinggi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatannya. Keterbatasan ruang yang *habitable* akan merupakan kendala yang signifikan terhadap perkembangan selanjutnya.

Faktor transportasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kemampuan jangkauan dari pengangkutan barang, orang, jasa dan informasi. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah memengaruhi perkembangan kota-kota di dunia. Hal ini sangat terlihat setelah terjadinya revolusi industri di kawasan Eropa Barat yang kemudian berimbas secara luar biasa di berbagai sektor kehidupan termasuk ke dalam sektor transportasi dan komunikasi. Oleh karena jarak jangkauan angkutan dari satu kota kearah luar menjadi semakin jauh, maka dampak fisik perkembangan kota pun terjadi, sehingga kota-kota lebih diwarnai oleh bentuk perkembangan memita (*ribbon development*) dan perkembangan lompat katak (*chess board development*). Gejala desentralisasi penduduk dan fungsi-fungsi sangat intensif terjadi dan kota-

kota berkembang secara fisik lebih cepat daripada waktu-waktu sebelumnya.

Beberapa faktor di atas akan menciptakan kota-kota tertentu menjadi besar atau tetap kecil peranannya bagi daerah sekitar maupun bagi wilayah lain yang jauh. Untuk kota-kota yang pengaruhnya sangat terbatas bagi lingkungan sekitarnya dan belum mampu menjalin keterkaitan fungsional secara langsung dengan wilayah lain adalah kota lokal (*local city*). Untuk kota-kota yang pengaruhnya mampu menjalin keterkaitan fungsional secara langsung dengan wilayah yang lebih luas bahkan dengan kota-kota lain adalah kota regional (*regional city*). Ada rentangan yang sangat luas mengenai pengertian regional dalam hal ini, sehingga pemaknaanya pun terentang luas pula (Yunus, 2008). Dari kota-kota yang berdiri sendiri-sendiri sampai dengan kota-kota yang secara fisik sudah menyatu dengan kota-kota lain walaupun belum mencapai tataran suatu wilayah *megapolitan*. Keterkaitan yang terjalin sudah sangat luas bahkan sampai ke tataran nasional. Sementara itu ada beberapa kota yang telah mampu menjalin keterkaitan fungsional secara langsung dengan kota-kota besar di dunia dan memosisikan dirinya sebagai bagian jaringan global yang solid dan kota seperti ini adalah kota internasional (*international city*). Ekspresi spasial kota internasional juga sangat bervariasi adanya dan pada umumnya merupakan kota yang amat sangat besar walaupun hanya berkembang dari kota-kota secara individual semata dalam artian bahwa kota yang terbentuk bukan karena hasil koalisi dari beberapa kota utama, namun hanya satu kota utama

saja. Namun, kenyataannya kota-kota internasional terbentuk dari beberapa kota utama yang bergabung menjadi satu sehingga ekspresi spasialnya menjadi sedemikian besar dan pada saat ini dikenal dengan *megacity/megapolitan* (Yunus, 2008).

C. Transformasi Wilayah Peri Urban

1. Transformasi Fisikal WPU

Transformasi fisik yang terjadi adalah merupakan pencerminan dinamika kehidupan penduduk itu sendiri. Kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan manusia mempunyai peranan sentral dalam setiap sendi kehidupan di wilayah yang bersangkutan dan sekelilingnya, maka pengaruh keberadaan kota terhadap wilayah peri urban juga sangat signifikan. Makin mendekati kota, maka pengaruh yang ditimbulkannya terhadap kondisi lingkungan juga semakin kuat. Demikian pula halnya dengan pengaruh kota yang timbul terhadap kondisi fisiknya (Yunus, 2008). Sebagai contoh adalah pengaruh pusat pendidikan yang dibangun di lokasi yang agak jauh dari kota, maka intensitas pembangunan fisik yang terjadi di sekitarnya, kemungkinan besar akan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bagian wilayah peri urban yang jaraknya ke kota lebih dekat. Demikian pula halnya dengan pengaruh aksesibilitas terhadap intensitas pembangunan yang muncul pada bagian-bagian tertentu dari wilayah peri urban. Kondisi fisik kota merupakan indikator normatif yang menjadi acuan setiap bentuk transformasi fisik ruang yang bersangkutan. Terkait dengan konsepsi

morfologi kota (*urban morphology*), menurut Hinderink dan Sterkenburg, 1975, dalam Yunus, 2008, ada empat hal pokok yang selalu digunakan sebagai bahan pembahasan, yaitu (1) karakteristik bentuk pemanfaatan lahan (*land use characteristics*), (2) karakteristik bangunan (*building characteristics*), (3) karakteristik permukiman (*settlement characteristic*) dan (4) karakteristik sirkulasi (*circulation characteristics*).

2. Transformasi Ekonomi WPU

Sejalan dengan perkembangan wilayah peri urban sebagai akibat dari pengaruh pertambahan penduduk dan kegiatan, khususnya kegiatan ekonominya juga mengalami perubahan. Pengaruh kegiatan ekonomi kekotaan yang secara umum dikaitkan dengan kegiatan ekonomi berorientasi non-agraris lambat laun akan semakin nyata terlihat. Transformasi kegiatan ekonomi kedesaan menjadi kekotaan tampak dalam beberapa hal antara lain (1) transformasi kegiatan perekonomian yang dilaksanakan oleh penduduk asli dan (2) meningkatnya kegiatan perekonomian yang diprakarsai oleh penduduk pendatang.

3. Transformasi Sosial

Karakteristik wilayah peri urban yang mempunyai *attracting forces* baik bagi penduduk perdesaan maupun penduduk perkotaan telah mengakibatkan banyaknya pendatang baru baik berupa perorangan maupun institusi. Wacana yang berkembang berkaitan dengan transformasi sosial adalah dari sifat-sifat sosial kedesaan menjadi sifat-sifat kekotaan. Makin dekat dengan lahan kekotaan terbangun, maka makin kental suasana

kekotaan secara fisik yang terlihat dan hal ini selalu berasosisasi secara spasial dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan berkaitan dengan perubahan sosial ini antara lain (1) mata pencaharian, (2) keahlian/keterampilan, (3) kekerabatan, (4) kelembagaan sosial, (5) strata sosial, (6) kontrol sosial, (7) mobilitas penduduk (Nelson, 1955, dan Yunus, 2006).

D. Penelitian Relevan

- a. Helly Wiror, mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin dengan judul tesis “Analisis Hirarki dan Orientasi Pelayanan Pusat-pusat Wilayah pembangunan Di Propinsi Irian Jaya (2000)”. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji besaran pusat-pusat wilayah, orientasi perdagangan, dan membandingkan pembangunan yang ditetapkan dengan wilayah pengaruh pusat-pusat wilayah pembangunan.
- b. Parera, melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hirarki Pusat Pelayanan Perdesaan dan Aksesibilitasnya di Kabupaten Purworejo”. Tujuan dari penelitian tersebut; untuk menilai hirarki pelayanan berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanannya, mengetahui proses persebaran perdesaan yang berkedudukan sebagai pusat kegiatan – kegiatan pelayanan, mengidentifikasi ketersediaan fasilitas – fasilitas pelayanan dasar dalam kelas jumlah penduduk tertentu, serta mengetahui

aksesibilitas pusat pelayanan perdesaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan faktor – faktor yang menentukan.

- c. Musdalifah, mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin dengan judul tesis “Kajian Kota Kandangan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi Wilayah Pembangunan Benua Lima Kalimantan Selatan (2000)”. Tujuan dari penelitian tersebut, untuk mengetahui penentuan pusat wilayah pengembangan di benua Lima sesuai dengan dan indeks tingkat perkembangan masing-masing Kabupaten. Mengetahui pusat sub wilayah pembangunan telah berperan atau berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi daerah hinterlandnya.
- d. Abustan, mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin dengan judul tesis “Peranan Sub-Wilayah Sebagai Pusat Pengembangan Pembangunan Daerah Di kabupaten Daerah Tingkat II Bone (2002)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menemukannya Sub-Wilayah (Kecamatan) yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan pembangunan daerah. Untuk menganalisis hirarki dan indeks tingkat perkembangan Sub-Wilayah (Kecamatan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- e. Berkah Yulianto, Kajian Spasial Perkembangan Kota Puwodadi, Tesis, 2005. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji aspek spasial perkembangan Kota Purwodadi berdasarkan perubahan fisik kawasan terbangunnya.

- f. Sakti Adji Adisasmita, 2002. Judul tesis “Analisis Tentang Hirarki dan Wilayah Pengaruh Kota Utama dan Kota-Kota menengah Di Propinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi pelayanan kotamadya Ujungpandang, Kotamadya Parepare, Kota Administratif Watampone dan Kota Administratif Palopo, sebagai (a) pusat administrasi pemerintahan, (b) pusat pelayanan jasa distribusi (perdagangan dan perubungan), (c) pusat pengembangan industri, (d) pusat pelayanan pendidikan, (e) pusat pelayanan kesehatan, dan (f) pusat pelayanan pariwisata.
- g. Sri Budi Artiningsih, 2006. Tugas Akhir “Analisis Daya Tarik Dua Pusat Pelayanan Dalam Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pusat pelayanan (Kota Kutoarjo dan Kota Purworejo) manakah yang memiliki daya tarik paling kuat. Serta untuk mengetahui strategi apakah yang dapat dilakukan guna mendukung pengembangan pusat pelayanan yang memiliki daya tarik paling rendah.
- h. Muhammad Akhdar, (2016). Judul Tesis “Implikasi Sistem Perkotaan Nasional Terhadap Perkembangan Kota palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana efektivitas fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam mendorong perkembangan Kota Palopo menjadi lebih pesat. Serta untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan fungsi Kota Palopo

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam mendorong perkembangan Kota Palopo agar bisa lebih pesat.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6 *Road Map* Penelitian relevan sebagai berikut.

Tabel 2.1: Road Map Penelitian Sejenis

No.	JUDUL (Nama, Sumber, Tahun)	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN	METODOLOGI PENELITIAN			HASIL
				Wilayah	Metode Analisis	Lingkup Bahasan	
1.	Helly Weror , tesis “Analisis Hirarki dan Orientasi Pelayanan Pusat-pusat Wilayah pembangunan Di Propinsi Irian Jaya (2000)”.	1. Seberapa besar ukuran pusat-pusat wilayah pembangunan sebagai pusat pertumbuhan, dan seberapa besar tingkat kesenjangannya terhadap ibukota propinsi. 2. Bagaimana kecenderungan orientasi perdagangan pusat-pusat wilayah pembangunan, dan sejauh mana kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.	Mengkaji besaran pusat-pusat wilayah, orientasi perdagangan, dan pembangunan yang ditetapkan dengan wilayah pengaruh pusat-pusat wilayah pembangunan.	Pusat wilayah pembangunan Propinsi Irian Jaya	Deskriptif, Scalogram, Analisis Gravitasi	-Mengkaji orientasi pelayanan pusat-pusat pembangunan propinsi Irian Jaya	- Besaran pusat-pusat wilayah pembangunan di Irian Jaya pada umumnya relatif kecil, dan mempunyai tingkat kesenjangan yang besar terhadap ibukota Propinsi Irian Jaya. - Terdapat perbedaan antara wilayah pembangunan yang ditetapkan dengan wilayah pengaruh pusat-pusat wilayah pembangunan.

2,	<p>Parera, tesis “Kajian Hirarki Pusat Pelayanan Perdesaan dan Aksesibilitasnya di Kabupaten Purworejo”.</p>	<p>1. Bagaimana hirarki pelayanan berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanannya.</p> <p>2. Bagaimana proses persebaran perdesaan yang berkedudukan sebagai pusat kegiatan – kegiatan pelayanan.</p> <p>3. Bagaimana ketersediaan fasilitas – fasilitas pelayanan dasar dalam kelas jumlah penduduk tertentu.</p> <p>4. Bagaimana aksesibilitas pusat pelayanan perdesaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan faktor – faktor yang menentukan.</p>	<p>1. untuk menilai hirarki pelayanan berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanannya.</p> <p>2. untuk mengetahui proses persebaran perdesaan yang berkedudukan sebagai pusat kegiatan – kegiatan pelayanan.</p> <p>3. Untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas – fasilitas pelayanan dasar dalam kelas jumlah penduduk tertentu.</p> <p>4. serta mengetahui aksesibilitas pusat pelayanan perdesaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan faktor – faktor yang menentukan.</p>	Kabupaten Purworejo	Normatif dan Komparatif	Mengkaji pusat pelayanan serta aksesibilitas Kab. Purworejo.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hirarki pelayanan perdesaan terbagi menjadi tiga orde yaitu orde tiga sebagai pusat (dengan 18 desa), orde dua sebagai desa potensi untuk menjadi pusat pelayanan, dan orde tiga sebagai desa <i>hinterland</i>.</p>
----	---	---	--	---------------------	-------------------------	--	--

3.	<p>Musdalifah, tesis “Kajian Kota Kandangan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi Wilayah Pembangunan Banua Lima Kalimantan Selatan (2000)”.</p>	<p>1. Apakah penentuan pusat sub wilayah pembangunan Banua Lima disesuaikan dengan hirarki dan indeks tingkat perkembangan masing-masing Kabupaten?</p> <p>2. Apakah pusat sub wilayah pembangunan telah berperan atau berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi daerah hinterlandnya?</p>	<p>1. untuk mengetahui penentuan pusat wilayah pengembangan di banua Lima sesuai dengan dan indeks tingkat perkembangan masing-masing Kabupaten.</p> <p>2. Mengetahui pusat sub wilayah pembangunan telah berperan atau berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi daerah hinterland.</p>	Kota Kandangan Kabupaten Kalimantan Selatan.	<p>1. Analisis PDRB</p> <p>2. Scalogram</p> <p>3. Deduktif</p>	Pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah Kota Kandangan Kabupaten Kalimantan Selatan.	Kesenjangan pembangunan terjadi di wilayah pembangunan Banua Lima dengan koefisien ketimpangan cukup tinggi.
4.	<p>Abustan, tesis “Peranan Sub-Wilayah Sebagai Pusat Pengembangan Pembangunan Daerah Di kabupaten Daerah Tingkat II Bone (2002)”.</p>	<p>1. Apakah Penentuan Pusat-Pusat Sub-Wilayah Pengembangan Disesuaikan Dengan Hirarki Dan Indeks Tingkat Perkembangan Kecamatan Di Kabupaten?</p> <p>2. Apakah Pusat-Pusat</p>	<p>1. untuk mengetahui menemukan Sub-Wilayah (Kecamatan) yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan pembangunan daerah.</p> <p>2. Untuk menganalisis</p>	Kabupaten Bone	Deduktif, Scalogram, Distribusi Quetion.	Pusat pengembangan pembangunan Kabupaten Bone.	<p>1. Pusat-pusat sub-wilayah pengembangan tidak dapat berfungsi atau berperan sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya, hal ini dipengaruhi oleh ketidaktersediaan atau keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan sosial ekonomi pada pusat-pusat tersebut.</p> <p>2. Penentuan pusat-pusat sub-wilayah pengembangan yang disesuaikan</p>

		Sub-Wilayah Pengembangan Yang Ada Telah Berperan Atau Berfungsi Sebagai Sub-Wilayah Pengembangan Di Kabupaten Bone?	hirarki dan indeks tingkat perkembangan Sub-Wilayah (Kecamatan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.				dengan hirarki dan indeks tingkat perkembangan kecamatan, dapat meningkatkan sinergi wilayah dan menciptakan terjadinya interaksi fungsional antara pusat-pusat yang tinggi ordenya dengan pusat-pusat yang rendah ordenya dan antara pusat dengan daerah pendukungnya dalam melakukan fungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi penduduk.
5	Berkah Yulianto, Kajian Spasial Perkembangan Kota Puwodadi, Tesis, 2005. Penelitian ini bertujuan	Perkembangan kawasan terbangun di Kota Purwodadi tidak hanya terjadi pada kawasan-kawasan yang umumnya sudah cukup tersedia sarana dan prasarananya, tetapi melebar ke wilayah lain, jika hal ini dibiarkan terjadi maka pemerintah harus menyediakan prasarana dan fasilitas kota yang lebih banyak.	Mengkaji aspek spasial perkembangan Kota Purwodadi berdasarkan perubahan fisik kawasan terbangunnya.	Kota Purwodadi	<ul style="list-style-type: none"> - Metode <i>overlay</i> perkembangan kawasan terbangun. - Metode pengukuran gravitasi terhadap interaksi keruangan (<i>spatial interaction</i>). - Analisis statistik untuk menguji interaksi keruangan. - Analisis kesesuaian kawasan terbangun dengan rencana umum tata ruang kota 	<ul style="list-style-type: none"> -Perkembangan kawasan terbangun. -Interaksi spasial. -Kesesuaian terhadap rencana umum tata ruang Kota Purwodadi. -Perkembangan spasial 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan spasial yang terjadi di wilayah Kota Purwodadi terjadi di sekitar kawasan yang telah ada (invasion) yaitu wilayah yang secara administrative merupakan pusat pemerintahan desa atau kelurahan, sementara fenomena perkembangan kawasan baru yang tumbuh di luar kawasan yang sudah ada atau melompat (<i>sprawl</i>), diidentifikasi terjadi di luar wilayah yang secara administratif merupakan pusat pemerintahan desa atau kelurahan. -Pola perkembangan kawasan terbangun yang acak (<i>random</i>) dapat terjadi karena berkaitan erat dengan bentuk perkembangan yang invasion,

							<i>sprawl</i> atau sporadis.
6	Sakti Adji Adismita , 2002. Tesis “Analisis Tentang Hirarki dan Wilayah Pengaruh Kota Utama dan Kota-Kota menengah Di Propinsi Sulawesi Selatan”.	Berapa besar kesenjangan antara kota utama Ujungpandang dengan kota-kota menengah (Pare-pare, Watampone dan Palopo).	untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi pelayanan kotamadya Ujungpandang, Kotamadya Pare-pare, Kota Adminstratif Watampone dan Kota Admnistratif Palopo, sebagai (a) pusat administrasi pemerintahan, (b) pusat pelayanan jasa distribusi (perdagangan dan perubungan), (c) pusat pengembangan industri, (d) pusat pelayanan pendidikan, (e) pusat pelayanan kesehatan, dan (f) pusat pelayanan pariwisata.	Propinsi Sulawesi Selatan	Deduktif, Scalogram, Rumus Gravitasi.	Pusat pelayanan kota orde I (Ibukota Propinsi) dan kota-kota menengah (Pare-pare Watampone dan Palopo).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi-fungsi pelayanan pusat-pusat (sebagai pusat administrasi pemerintahan jasa distribusi, kegiatan industri, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pariwisata) baik secara masing-masing maupun secara keseluruhan, urutan peringkat dari pusat-pusat akan searah dengan besaran kotanya (jumlah penduduk). 2. Hirarki pusat terdapat kesenjangan antara kota utama (ibukota propinsi/kota orde I) dengan kota-kota menengah terutama dilihat dari volume bongkar muat barang melalui pelabuhan relatif lebih besar dibandingkan erdasarkan jumlah penduduk dan nilai PDRB.
7	Sri Budi Artiningsih , 2006. Tugas Akhir	1. Pusat pelayanan (Kota Kutoarjo dan Kota Purworejo)	untuk mengetahui pusat pelayanan (Kota Kutoarjo dan	Kabupaten Purworejo	- Analisis Gravitasi - Skalogram Guttman		Pusat pelayanan yang memiliki kemampuan daya tarik paling kuat adalah Kota Purworejo. Pusat

	“Analisis Daya Tarik Dua Pusat Pelayanan Dalam Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Purworejo”.	manakah yang memiliki daya tarik paling kuat? 2. Strategi apakah yang dapat dilakukan guna mendukung pengembangan pusat pelayanan yang memiliki daya tarik paling rendah?	Kota Purworejo) manakah yang memiliki daya tarik paling kuat. Serta untuk mengetahui strategi apakah yang dapat dilakukan guna mendukung pengembangan pusat pelayanan yang memiliki daya tarik paling rendah.		- SWOT		pelayanan Kota Kutoarjo dinilai pantas sebagai pusat pelayanan berhirarki I karena memiliki kemampuan jangkauan pelayanan yang sama besarnya dengan pusat pelayanan Kota Purworejo. Sedangkan, pusat pelayanan Kota Kutoarjo yang memiliki daya tarik rendah dapat dilakukan strategi khusus guna mendukung pengembangan wilayahnya, antara lain: pengembangan fungsi pelayanan di bidang pelayanan jasa transportasi, dan peningkatan jumlah sarana maupun kualitas pelayanan perdagangan dan jasa guna mendukung pengembangan pusat pelayanan Kota Kutoarjo di bidang transportasi. Misalnya, jasa penginapan (Hotel), jasa angkutan umum (pangkalan ojek).
8	Muhammad Akhdar , Tesis “Implikasi Sistem Perkotaan Nasional Terhadap Perkembangan Kota palopo”.	- Masih rendahnya alokasi dan implementasi program pengembangan dan pembangunan di wilayah Kota Palopo terkait dengan penguatan fungsi dan	- Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan program pengembangan dan pembangunan Kota Palopo terkait dengan fungsi dan perannya sebagai	Kota Palopo	- Deduktif - Content Analysis - Multikriteria - Skala Guttman	- Kebijakan spasial nasional, provinsi, dan kota; - Kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya; - Pola Penggunaan lahan saat ini;	- Pertama, optimalisasi fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional sangat ditentukan oleh 11 (sebelas) kriteria fungsi pelayanan kota, dimana kualitas pelayanan tertinggi dari fungsi Kota Palopo tersebut: pertama; ada pada

		<p>perannya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan Kota Palopo sejauh ini lebih didorong oleh faktor kebutuhan sebagai dampak dari bertambahnya jumlah penduduk Kota Palopo itu sendiri beserta beragam aktivitasnya (faktor internal), belum signifikan adanya faktor eksternal; - Peningkatan fungsi dan peran Kota Palopo secara faktual dan yuridis sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) belum optimal karena belum disertai (belum paralel) dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung fungsi dan peran tersebut. 	<p>PKW.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis aspek-aspek kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan Kota Palopo; - Mengkaji kondisi sarana dan prasarana yang ada terkait dengan penguatan fungsi dan peran Kota Palopo sebagai pusat kegiatan wilayah. 		<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan sarana perkotaan;/ - Alokasi anggaran pembangunan 	<p>fungsi pelayanan jasa, kedua; fungsi pelayanan perdagangan, kemudian ketiga; fungsi pelayanan pendidikan, serta fungsi pelayanan kesehatan diurutan keempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedua, untuk mengoptimalkan fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang diperlukan pengembangan dan pembangunan beragam jenis dan jumlah fasilitas pendukung masing-masing fungsi Kota Palopo tersebut dengan skala/cakupan pelayanan regional dari kondisi saat ini (<i>existing condition</i>). - Ketiga, jenis fungsi pelayanan jasa yang cukup optimal dan saat ini dominan mendukung fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah komponen jasa perbankan, dimana untuk fasilitas perbankan tersebut saat ini tersedia sebanyak 9 (sembilan) bank yang memiliki kantor-kantor cabang
--	--	--	--	--	--	--

							pembantu pada pusat-pusat kabupaten terdekatnya, seperti di Belopa (Kabupaten Luwu), Masamba (Kabupaten Luwu Utara), Malili (Kabupaten Luwu Timur), Soroako (Kabupaten Luwu Timur), Rantepao (Kabupaten Toraja Utara), dan Makale (Kabupaten Tana Toraja). Fungsi lainnya yang juga cukup optimal dan dominan mendukung fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah fungsi pendidikan. Dimana saat ini telah tersedia 11 (sebelas) perguruan tinggi dalam bentuk universitas, sekolah tinggi, dan akademi.
9	Nurqalbih Ramadhani Yusuf , Tesis “Studi Jangkauan Pelayanan Pusat-Pusat Pembangunan Daerah Di Kota Palopo Terhadap Wilayah Hinterland”. 2018	1. Bagaimana hirarki pusat-pusat pembangunan di daerah Kota Palopo dan hinterland dilihat dari fungsi pelayanan? 2. Sejauh mana jangkauan pelayanan dapat mempengaruhi penetapan fungsi	1. Mengkaji dan menganalisa hirarki pusat-pusat pembangunan di daerah Kota Palopo dan hinterland dilihat dari fungsi pelayanan. 2. Mengkaji dan menganalisis luas jangkauan	Kota Palopo	Deduktif, Normatif, dan Komparatif	1. Kependudukan, sosial ekonomi. 2. Fungsi Pelayanan	1. Dominasi Kota Palopo (81,81%) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) masih relatif lemah, yang artinya bahwa fungsi Kota Palopo hingga saat ini belum optimal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau kawasan perkotaan yang berfungsi melayani skala/cakupan regional. 2. Dilihat luas jangkauan wilayah pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu dengan jarak batas gaya

		<p> pelayanan pusat- pusat wilayah pembangunan di Kota Palopo terhadap hinterland? </p>	<p> pelayanan pengaruh pusat Kota Palopo terhadap daerah Hinterland. </p>				<p> tarik yang dimiliki hanya menjangkau pada radius sejauh 25,37 Km. Pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu Utara dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 67,67 Km. Sedangkan Luas Jangkauan Kota Palopo – Luwu Timur dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 94,30 Km. Semakin besar angka radius antar Kota Palopo dengan Kab. Luwu Timur maka semakin erat hubungan interaksinya antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya. </p>
--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber : Penulis, 2018

E. Kerangka Pikir

Dalam sistem pewilayahan pembangunan Daerah di Kota palopo, telah ditetapkan pusat-pusat pembangunan yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan berdasarkan sistem hirarki. Penetapan sistem hirarki tersebut ditunjukkan untuk efisiensi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan daerah serta pemerataan pelayanan keseluruhan Wilayah. Dengan sistem ini diharapkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah dapat tercapai.

Uraian teori-teori mengenai pembangunan wilayah pada hakekatnya menjelaskan dua hal penting yaitu : pertama, adanya pusat pertumbuhan, kedua: adanya pemanfaatan ruang. antar pusat dan wilayah pengaruh secara pasti terjadi keterhubungan dan ketergantungan yang didukung oleh transportasi.

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi fungsi pelayanan pusat pertumbuhan adalah : penduduk, fasilitas, jarak, serta arus barang dan jasa. Penduduk dan fasilitas merupakan daya tarik yang mencirikan kuatnya pengaruh pusat pertumbuhan terhadap wilayah belakangnya maupun wilayah pengembangannya. Namun pengaruh ini semakin melemah dengan meningkatnya jarak. Ini berarti, penduduk dan fasilitas berkorelasi positif terhadap pusat pertumbuhan, sedangkan jarak berkorelasi negatif terhadap pusat pertumbuhan.

Jumlah penduduk menentukan ambang batas permintaan fasilitas yang diperlukan untuk menentukan pelayanan jasa. Pada pusat-pusat pertumbuhan

yang besar terdapat jumlah penduduk yang lebih banyak dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Ketersediaan fasilitas mencerminkan fungsi pelayanannya. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin lengkap ketersediaan fasilitas menunjukkan semakin tinggi hirarki suatu pusat pertumbuhan dapat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk maupun fungsi pelayanan fasilitasnya.

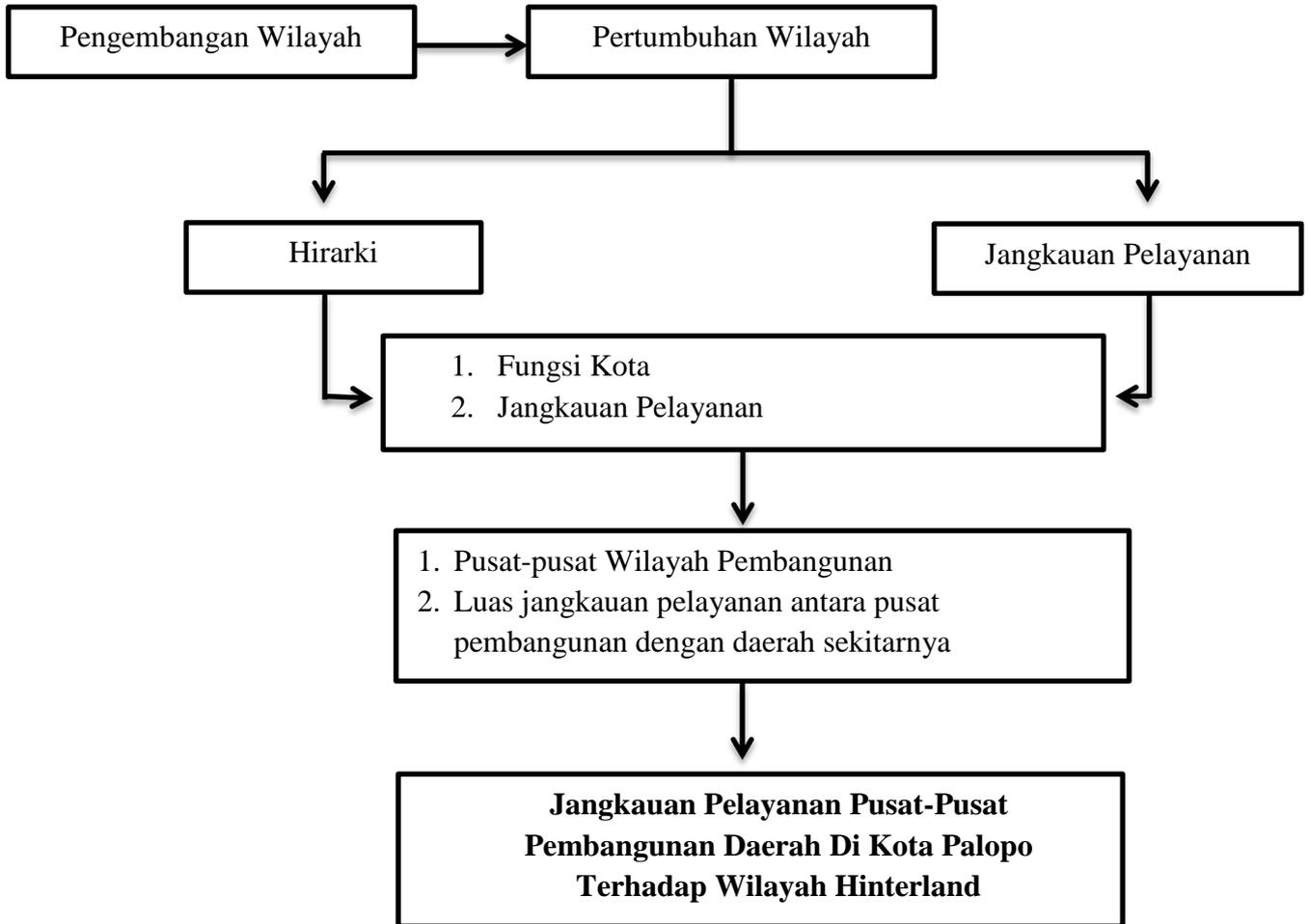
Dalam melaksanakan fungsinya, setiap pusat pertumbuhan secara pasti mempunyai keterkaitan fungsional dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya, hubungan fungsional ini terjadi berdasarkan arus barang dan jasa, terjadi sedemikian rupa sehingga membentuk fungsional berdasarkan aspek tata ruang (horisontal) akan terlihat suatu hirarki tata ruang. Hirarki tata ruang menjelaskan arah horisontal (orientasi geografi) dari pelayanan pusat pertumbuhan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, maka pada suatu wilayah, maka ada suatu wilayah pembangunan terdapat pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya. Pusat pertumbuhan yang tinggi ordenya akan mendominasi pusat-pusat pertumbuhan lainnya yang ada dalam ordenya: terjadi sedemikian rupa sehingga membentuk susunan pusat-pusat pertumbuhan (pusat-pusat wilayah pembangunan). Susunan pusat-pusat wilayah pembangunan ini mencerminkan hirarki dari masing-masing pusat wilayah pembangunan tertentu dalam suatu sistem wilayah.

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis hirarki dan jangkauan layanan fasilitas area perkotaan wilayah kota palopo dan sekitarnya guna mengoptimalkan wilayah pembangunan;

mengkaji Hirarki Kota Palopo dan sekitarnya ditinjau dari besaran jarak dan jangkauan serta fungsi dari kota-kota tersebut menggunakan alat analisis skala guttman, serta mengkaji ukuran populasi Kota Palopo berkaitan dengan meningkatnya jangkauan pelayanan Kota pada daerah sekitarnya menggunakan alat analisis model gravitasi.

Penyederhanaan hubungan kerangka pikir tersebut diatas dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

F. Hipotesis

Beberapa pokok pikiran yang dapat dirangkum dari tinjauan pustaka dapat dikemukakan sebagai berikut: **Pertama**, pusat-pusat pelayanan merupakan pusat untuk melaksanakan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan penduduk, untuk itu pusat pelayanan harus memiliki berbagai jenis fasilitas dalam jumlah tertentu. **Kedua**, jenis dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh suatu pusat tergantung dari faktor penduduk (jumlah dan komposisi), sehingga skala kegiatan jasa setiap fasilitas memiliki hirarki. **Ketiga**, suatu fasilitas memiliki jarak jangkauan yang efektif (radius jangkauan) sehingga penyebarannya harus memperhatikan beberapa faktor seperti kondisi geografis, jumlah penduduk maupun sebaran penduduk suatu wilayah. **Keempat**, untuk meningkatkan fungsi pelayanan suatu pusat, diperlukan suatu strategi agar pembangunan dan pengembangannya searah besarnya skala kegiatan dan tingkat kebutuhan penduduknya.

Dari beberapa pokok pikiran tersebut maka diturunkan **4 Hipotesis** sebagai berikut :

1. Suatu pusat pelayanan memainkan peranan penting dalam menyediakan fasilitas untuk menampung kegiatan dan memenuhi kebutuhan penduduk, namun tidak semua jenis dan jumlah fasilitas harus sama untuk setiap tempat.
2. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada penduduk, fasilitas seharusnya ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan

penyebarannya disesuaikan dengan radius jangkauan sehingga suatu fasilitas yang sejenis tidak bertumbuh pada suatu lokasi tertentu.

3. Kurang berfungsinya suatu pusat pelayanan disebabkan kurangnya fasilitas yang dimiliki, sehingga memerlukan strategi untuk mengembangkan pusat pelayanan tersebut pada masa datang.
4. Jumlah penduduk pada suatu daerah tidak selamanya harus berpatokan pada jumlah dan fungsi kota serta pelayanan yang ada pada daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai metode dan prosedur penelitian dari studi ini meliputi penjelasan ringkas tentang pendekatan-pendekatan untuk menganalisis kedua proposisi yang diajukan; Pembahasan pada bab ini dimulai dari Fokus dan *Locus* penelitian; Waktu Penelitian; jenis dan sumber data; populasi dan sampel; metode pengumpulan data; variabel penelitian; teknik analisis; dan diakhiri oleh definisi operasional.

A. Fokus dan *Locus* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dan daerah sekitarnya (*hinterland*). Pada penelitian ini difokuskan untuk meneliti hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah di tinjau dari jangkauan layanan. Untuk dapat melakukan pengukuran, peneliti melakukan kajian dari berbagai literatur yang terkait dengan hasil pengamatan langsung dilapangan yang di jabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik terhadap variabel mandiri terhadap hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah di tinjau dari jangkauan pelayanan dan jumlah fungsi.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan terhitung bulan Maret 2016 hingga Februari 2018.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Penelitian															
		Maret 2016				April 2016				Agust-Sept 2017				Februari 2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■										
2	Ujian Proposal							■									
3	Persiapan instrumen penelitian								■								
4	Pengumpulan data									■	■						
5	Analisis dan Penafsiran data									■	■						
6	Penyusunan hasil penelitian										■	■	■				
7	Seminar (Uji) hasil penelitian													■			
8	Perbaikan hasil seminar penelitian														■		
9	Sidang Tesis															■	
10	Perbaikan hasil sidang tesis																■
11	Pengumpulan Tesis																■

(Sumber : Penulis, 2018)

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui instansi yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian serta dokumen-dokumen resmi menyangkut penelitian ini yang didapatkan dari berbagai instansi yang terkait misalnya : BPS, BAPPEDA, dan Dinas Tata Ruang. Dari penjelasan diatas kebutuhan data dalam penelitian sesuai dengan jenis dan sumber data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Kebutuhan Data Penelitian

No	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan
1	<u>Jenis Data Primer</u> Memahami keadaan geografis, Keadaan fasilitas Sosial, Keadaan Fasilitas Ekonomi, dan Transportasi.	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Dokumentasi• Survei dengan menggunakan kuesioner	Untuk mengetahui gambaran umum wilayah studi
1	<u>Jenis Data Sekunder</u> Fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Dokumentasi• Survey dengan menggunakan kuesioner	Untuk mengukur fungsi pelayanan kota dan menentukan hirarki kota
2	Data kependudukan <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Penduduk• Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai data pendukung dalam menganalisis

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk menurut jenis kegiatan 		
3	Luas jangkauan <ul style="list-style-type: none"> • Jarak • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menentukan luas jangkauan

Sumber : Penulis, 2016

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah salah satu bagian kegiatan yang sangat penting, jika teknik dalam pengambilan data menggunakan cara yang kurang tepat maka data yang di peroleh pun akan kurang akurat dan kemudian akan berpengaruh pada proses analisis dan hasil penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Observasi atau pengamatan**

Dengan melihat kita dapat mengetahui secara jelas, dapat mendeskripsikan suatu gambaran dan dapat menangkap suatu adegan yang sulit dipahami kalau hanya mendengar informasi saja (Satori dan Komariah; 2012 :103).

Dalam penelitian ini, metode observasi dilakukan terhadap beberapa komponen wilayah Kota Palopo, yakni:

- a. Pola dan kecenderungan penggunaan lahan saat ini;
- b. Pola sebaran, jumlah dan jenis prasarana dan sarana perkotaan;
- c. Kualitas prasarana dan sarana perkotaan yang ada.
- d. Kondisi prasarana dan sarana

- **Wawancara**

Menurut Satori dan Komariah (2012 : 129) melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada beberapa pihak-pihak terkait, yakni:

- a. Pejabat pemerintah Kota Palopo;
- b. Investor swasta; dan
- c. Masyarakat.

- **Dokumentasi**

Metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan terhadap beberapa dokumen perencanaan pembangunan, yakni:

- a. Dokumen rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN);
- b. Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo;

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang yang lain atau suatu obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan

Farhady, 1981 dalam Sugiyono, 2015:38). Juliansyah Noor (2011:47), dalam bukunya Metodologi Penelitian menyebutkan, variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang secara substansial dapat menjadi kerangka pembahasan yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Dalam penelitian ini, maka masing-masing variabel adalah sebagai berikut berikut:

- a. Variabel tergantung (*devendent variabel*), yakni Kota Palopo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Utama Pengembangan Kawasan Andalan Kota Palopo dan sekitarnya. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mampu melayani beberapa Kabupaten berdasarkan sistem hirarki.
- b. Variabel bebas (*independent variabel*), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mampu melayani beberapa Kabupaten berdasarkan sistem hirarki. Pusat wilayah pembangunan yang fungsi pelayanannya lebih besar umumnya memiliki fasilitas pelayanan yang lebih besar dan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Dengan ditetapkannya fungsi kota serta ciri-ciri fungsi pelayanan tiap pusat pembangunan didasarkan pada pertimbangan potensi fungsi yang ada, seperti :
 1. Fungsi jasa komersil;

2. Fungsi perdagangan;
3. Fungsi pendidikan;
4. Fungsi kesehatan;
5. Fungsi pelayanan umum;
6. Fungsi transportasi;
7. Fungsi pemerintahan;
8. Fungsi wisata dan rekreasi;
9. Fungsi hiburan;
10. Fungsi industri; dan
11. Fungsi pergudangan.

F. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian pada hakekatnya dimulai dari hasrat keingintahuan manusia, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan-permasalahan yang memerlukan jawaban atau pemecahannya, sehingga akan diperoleh pengetahuan baru yang dianggap benar. Pengetahuan baru yang benar tersebut merupakan pengetahuan yang dapat diterima oleh akal sehat dan berdasarkan fakta empirik.

Untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dapat digunakan dua jenis penalaran, yaitu Penalaran Deduktif dan Penalaran Induktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan kata

lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan.

Penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan, dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala.

Untuk itu, maka dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik analisis, yakni sebagai berikut:

1. Model Gravitasi

Model Gravitasi Hansen (dikutip dari Robinson Tarigan 2005) berkaitan dengan memprediksi lokasi dari permukiman penduduk berdasarkan daya tarik masing-masing lokasi. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa tersedianya lapangan kerja, tingkat aksesibilitas, dan adanya lahan perumahan yang masih kosong, akan memnarik penduduk untuk berlokasi ke subwilayah tersebut. Menurut Lee, model ini tidak persis sama dengan metode gravitasi karena tidak didasarkan atas saling interaksi antar subwilayah (zona), melainkan tiap subwilayah destination dianggap memiliki daya tarik tersendiri dan bagaimana suatau kegiatan dari keseluruhan wilayah bereaksi terhadap daya tarik tersebut. Artinya

origin tidak diperinci per subwilayah hanya *destination* yang diperinci per subwilayah. Hansen mula-mula menggabung jumlah lapangan kerja dan kemudahan mencapai lokasi sebagai *accessibility index* (indeks aksesibilitas). Secara umum indeks aksesibilitas adalah adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu subwilayah dan kemudahan untuk mencapai subwilayah tersebut.

Untuk mengukur kekuatan interaksi antar Wilayah digunakan formulasi sebagai berikut.

$$T_{ij} = \frac{P_i P_j}{D_{ij}^2}$$

T_{ij} = kekuatan gravitasi antara kecamatan pusat dengan hinterlandnya

P_i = Jumlah penduduk Kecamatan Pusat

P_j = Jumlah penduduk Kecamatan hinterland

D_{ij} = Jarak antara Kecamatan Pusat dengan Kecamatan hinterland

Model gravitasi digunakan untuk menginterpretasikan luas jangkauan wilayah dan luas wilayah berdasarkan besarnya gaya tarik penduduk sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : 1) Mengkaji dan menganalisis luas wilayah pelayanan pusat-pusat pembangunan di Kota Palopo dilihat dari besaran penduduk, dan 2) Mengkaji dan menganalisis luas jangkauan wilayah pengaruh pusat Kota Palopo terhadap daerah Hinterlandnya.

2. Skala Guttman

Penggunaan skala Guttman, yang disebut juga metode *scalogram* atau analisis skala (*scale analysis*) sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau yang diteliti, yang sering disebut isi universal (*universe of content*) atau atribut universal (*universal attribute*) Nazir (2014: 299). Dimana koefisien reproduksibilitas, yang mengukur derajat ketepatan alat ukur dibuat (yaitu daftar pertanyaan) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kr = 1 + \frac{e}{n}$$

Dimana:

Kr = Total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan x
jumlah responden

e = Jumlah *error*

Kr = Koefisien reproduksibilitas

Selanjutnya koefisien skalabilitas dengan rumus:

$$Ks = 1 - \frac{e}{P}$$

Dimana:

e = Jumlah *error*

P = Jumlah kesalahan yang diharapkan

Ks = Koefisien skalabilitas

Skala Guttman digunakan untuk menginterpretasikan jumlah bobot parameter sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni : 1) Mengkaji dan menganalisis sejauh mana potensi yang ada pada setiap pusat mempengaruhi penetapan fungsi pelayanan pusat-pusat wilayah pembangunan di Kota Palopo dan hinterlandnya, dan 2) menilai Mengkaji dan menganalisis hirarki pusat-pusat pembangunan di daerah ini dilihat dari besarnya penduduk dan fasilitas pelayanannya serta mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi penetapan hirarki pusat-pusat pembangunan di Kota Palopo.

Berdasarkan skor keseluruhan, dibuatlah ramalan tentang pola jawaban terhadap pernyataan-pernyataan tertentu melalui skala Guttman. Kemudian pola tanggapan yang sebenarnya diteliti dan diukur, sejauh mana tanggapan itu dapat direproduksi dari skor keseluruhan. Salah satu caranya adalah dengan membagi jumlah total kesalahan dengan jumlah total tanggapan dan hasilnya dipakai untuk mengurangi angka satu, sehingga diperoleh koefisien reproduksibilitas. Guttman menyarankan nilai 0,90 sebagai koefisien reproduksibilitas minimal yang diperlukan untuk serangkaian pernyataan agar dapat dianggap sebagai skala berdimensi tunggal atau skala kumulatif.

Skala Guttman digunakan untuk mengukur efektif atau tidak efektif kebijakan sistem perkotaan nasional terhadap perkembangan Kota Palopo. Skala Guttman dinyatakan dalam batas nilai tetap berada pada nilai terendah adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 1, maka bila nilai hasil

pengukuran dengan menggunakan skala Guttman adalah X nilai dapat ditulis secara matematis $0 \leq X \leq 1$. Jika nilai X tersebut terdapat diantara 0 dan 1 misalkan 0,20; 0,50; atau 0,60 atau bila nilai X tersebut terdapat persentase (%) misalnya menjadi 20% ($0,20/1 \times 100\%$), 50% atau 60% tabel interpretasi dapat diubah dari nilai nominal menjadi % dengan cara mengalikan 100%. Untuk memudahkan memberi penilaian maka perlu dibuat tabel interpretasi terhadap nilai X, pernyataan yang digunakan 0 = tidak efektif, dan pernyataan 1 = sangat efektif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo

1. Administrasi dan Geografis

Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga daerah otonom yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berstatus “Kota”, dengan luas wilayah 247,52 Km². Secara administrasi Kota Palopo terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan jumlah wilayah Kelurahan ada sebanyak 48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km². Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 Km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak sekitar 12,00 Km.

Kota Palopo terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau disebelah utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan), tepatnya pada titik koordinat 2^o53'15”– 3^o04'08” Lintang Selatan dan 120^o03'10” – 120^o14'34” Bujur Timur dengan jarak tempuh antara 6 - 7 jam (366 Km). Adapun batasan administrasi wilayah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara

Selengkapnya mengenai luas wilayah administrasi Kota Palopo dan hinterlandnya terlihat pada tabel dan secara visualisasi terlihat pada gambar berikut ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Palopo dan Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, dan Kab. Luwu Utara

No	Kota/Kabupaten	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Palopo	247,52
2.	Luwu Timur	6.944,88
3.	Luwu	3.000,25
4.	Luwu Utara	7.502,58

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2016



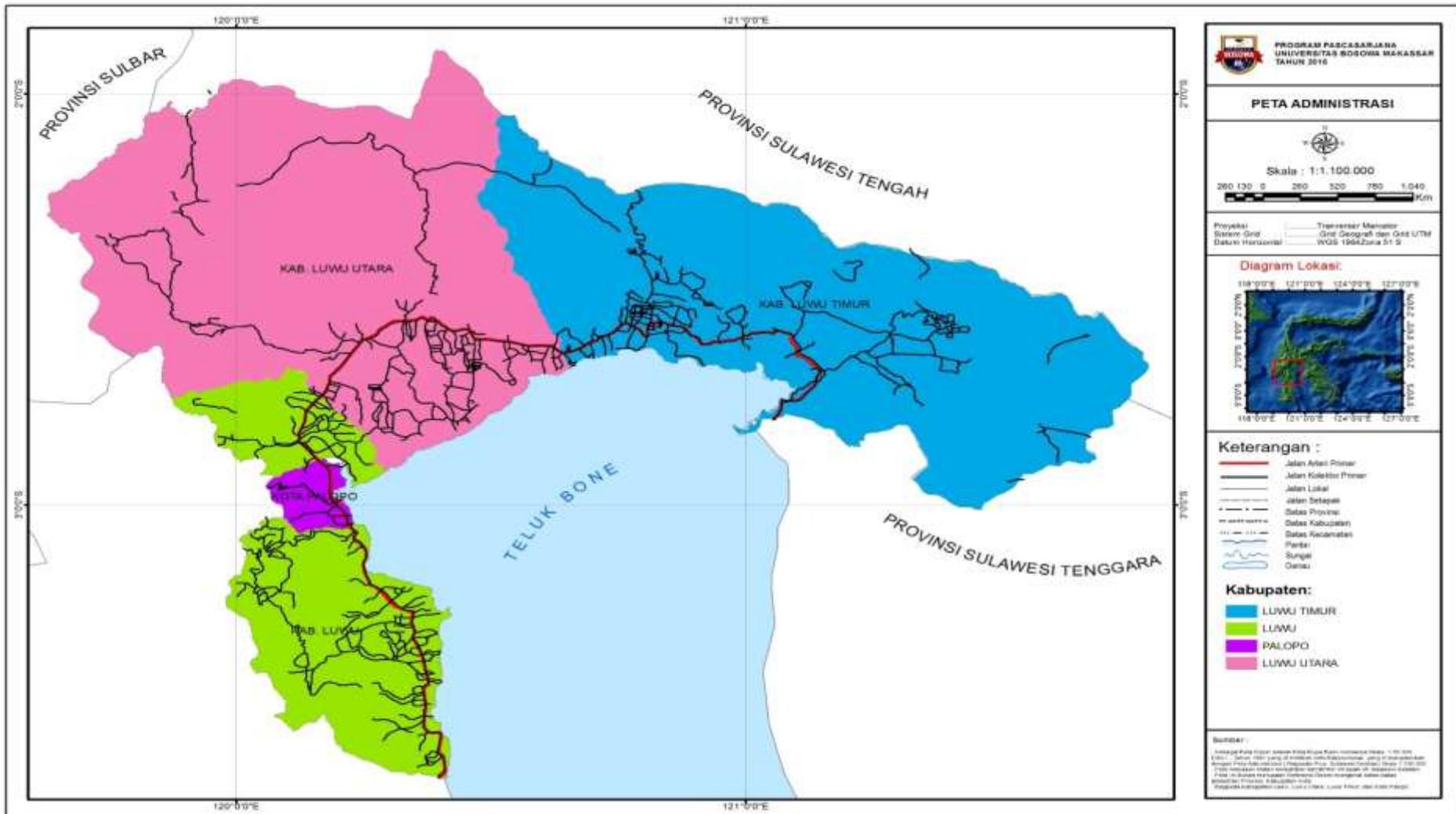
Gambar 4.1 Pintu Perbatasan Kota Palopo

Sumber : Survei Langsung, 2016

Tabel 4.2 Jarak antara Ibukota Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jarak dari Kota palopo	Waktu	Luas wilayah (Km²)
Palopo	-	-	247,52
Luwu Utara	154,1 Km	2 jam 51 menit	7.502,58
Luwu	59,3 Km	1 Jam 37 Menit	3.000,25
Luwu Timur	194,2 Km	4 jam 7 menit	6.944,88

Sumber : Survei Langsung, 2016



Gambar 4.2 Peta Administrasi

2. Topografi dan Kelerengan

Kondisi topografi Kota Palopo berada pada 0 – 1.500 meter dpl dengan bentuk permukaan cukup variatif yakni datar, curam, dan sangat curam. Wilayah Kota Palopo memiliki karakteristik sebagai wilayah tiga dimensi, yakni memiliki wilayah laut/ pesisir, dataran, dan perbukitan/ pegunungan. Tingkat kemiringan lahan cukup bervariasi yaitu : 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 40%, dan kemiringan diatas 40%. Kondisi topografi (ketinggian dan kemiringan lahan) tersebut dipengaruhi oleh letak geografis kota yang merupakan daerah pesisir pada bagian Timur, dan pada bagian Barat merupakan daerah perbukitan/pegunungan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut.

Keadaan morfologi wilayah bergunung dan berbukit terutama pada wilayah bagian barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Toraja Utara, sementara pada daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Luwu. Sedangkan wilayah bagian timur merupakan daerah pantai yang membujur dari utara ke selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 km. yang merupakan wilayah pesisir Teluk Bone.

3. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi

kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan rafting. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

- a. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
- b. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk

menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

4. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan wilayah dan kota, yang dapat berperan sebagai subyek ataupun obyek dalam pembangunan. Dinamika kependudukan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan atau perkembangan suatu kota, demikian halnya terhadap ukuran suatu kota dapat dinilai berdasarkan jumlah penduduk yang mendiami.

Distribusi Dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk merupakan persebaran penduduk yang menempati suatu wilayah atau kawasan baik secara administrasi maupun berdasarkan batasan geografis. Pada dasarnya jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Palopo Kabupaten *Hynterlandnya* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
1	Kota Palopo	168.894	247,52	682
2	Luwu Timur	275.595	6.944,88	40
3	Luwu	350.218	3.000,25	116,73
4	Luwu Utara	302.687	7.502,58	40

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2016

Tabel diatas menunjukkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing Kota/Kabupaten tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Palopo dengan jumlah penduduk 168.894 Jiwa dan luas wilayah 247,52 Km² sehingga menunjukkan tingkat kepadatan 682 jiwa/Km². Kondisi tersebut menunjukkan distribusi penduduk di Kota Palopo mengindikasikan akan cepat mengalami tingkat kejenuhan, sehingga kecenderungan mengalami penurunan kualitas lingkungan, akibat padatnya daya tampung bangunan penduduk dilokasi tersebut.

5. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kota Palopo dan kabupaten *hynterlandnya* merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan lahannya sampai saat ini masih daerah belum terbangun, terdiri dari pertanian (kebun campuran/tegalan/ladang, sawah dan tambak), padang rumput, taman dan kawasan lindung. Selebihnya daerah terbangun dan aliran sungai dll. Untuk kawasan terbangun, dominasi penggunaannya adalah perumahan dan kegiatan komersial, selebihnya, fasilitas umum/sosial, pelabuhan, TPI/PPI, dan terminal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Kota Palopo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)
1	Permukiman dan Pekarangan	4.622,00
2	Pemerintahan dan Pelayanan Umum/Sosial	62, 32

3	Perdagangan dan Jasa	215,23
4	Tegalan/Ladang	2.772
5	Padang Rumput	17,00
6	Lahan Kosong/Lahan Tidur	398,00
7	Hutan Rakyat	693,00
8	Hutan Lindung dan TWA	8.219,59
9	Perkebunan	1.566,41
10	Empang/Tambak	440,20
11	Sawah	1.861,88
12	RTH (Taman, Makam, Lap. OR dan Hutan Kota)	1.048,65
13	Terminal	2,62
14	Pergudangan	3,57
15	Pelabuhan	4,94
16	Pengolahan Batu Merah	10,87
17	Gardu PLN	1,53
18	Lainnya	2,812,19
Jumlah		24.752,00

Sumber : BPS, Kota Palopo Dalam Angka, 2016

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan Kota Palopo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Terbangun	4.908,64	19,83
2	Tidak Terbangun	17,031,71	68,81
3	Lain-lain	2,812,19	11,36
Jumlah		24.752,00	100,00

Sumber : Hasil Olahan Tabel 7, 2016

Perkembangan kawasan terbangun yang paling pesat ada pada wilayah Kecamatan Wara, Wara Timur, Wara Utara, Wara Selatan dan Bara. Untuk wilayah Kecamatan Telluwanua, Sendana, Mungkajang sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Sedangkan Kecamatan Wara Barat sebagian besar kawasan lindung (hutan lindung/daerah resapan).

Untuk lahan pertanian yang terdapat di Kota Palopo yakni di daerah pinggiran kota tepatnya di bagian utara, barat kota serta selatan dan dibagian timur sebagian lahan pertambahan.

Secara spatial pola penggunaan tanah Kota Palopo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sebagai pusat kegiatan dan orientasi utama Kota Palopo dalam hal ini merupakan pusat kota, yaitu di sekitar Pusat Niaga Palopo dan alun-alun kota (lapangan Gaspa dan Pancasila), sepanjang Jl. Durian, Jl. Kelapa, Jl. Rambutan, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Ahmad Yani, Jl. Balai Kota, Jl. Dipanegoro, Jl. Kartini, Jl. Andi Djemma, Jl. Anggrek. Kegiatan yang ada di pusat kota ini berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (Perkantoran dan fasilitas sosial) dan cagar budaya. Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman yang tinggi dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota ini di masa mendatang adalah bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu ada kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan

berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

2. Sub pusat pelayanan yang ada di Kota Palopo dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota, dimana di sub pusat pelayanan yang berkembang yaitu :
 - a. sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa perdagangan dan jasa di sepanjang Jl. Sudirman, Jl. Djemma dan Jl. Andi Kambo (Eks Jl. Merdeka).
 - b. Sub pelayanan utara yaitu berupa perdagangan dan jasa yaitu di sepanjang Jl. DR. Ratulangi, Perumnas Rampoang dan Kelurahan Maroangin.
 - c. Sub Pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jl. Andi Tadda, Jl. Sawerigading dan Jl. Cakalang.
 - d. Sub pelayanan bagian barat yaitu disepanjang jalan Veteran, Jl. KH. Muh. Kasim, Jl. Ahmad Razak dan Jl. Opu Tosappaile.

Dengan melihat sub pusat pelayanan di Kota Palopo tersebut menunjukkan bahwa pada sub-sub pelayanan itu, kegiatan yang dominan yaitu kegiatan perdagangan dan jasa, selain itu perkembangan sub pelayanan terjadi di sepanjang jalan utama wilayah kota.

3. Kawasan terbangun lainnya berupa perumahan akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Palopo dengan lokasi yang menyebar dan cenderung mengarah ke bagian timur, selatan, dan utara.

B. Pembahasan Masing-masing Fungsi Pelayanan

1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan dapat didasarkan misalnya pada (i) jumlah pegawai pemerintahan daerah (tetapi disamping itu terdapat pula pegawai pusat); atau (ii) menggunakan jumlah anggaran pembangunan daerah (disamping itu terdapat pembangunan yang dibiayai oleh swasta). Mengingat keterbatasan tersebut maka yang lebih mudah dibandingkan adalah lingkup fungsi pelayanannya dari masing-masing kota yang diamati dan banyaknya jumlah administrasi pemerintahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.6 Administrasi Pemerintahan

Kota/Kabupaten	Ibukota	Jumlah Adm Pemerintahan
Palopo	(1)√ (2)√	34
Luwu	-	31
Luwu Utara	-	29
Luwu Timur	-	30

Sumber : Survei Langsung, 2017

Catatan: (1). Kota

(2). Beberapa instansi yang mempunyai wilayah kerja lebih luas

Fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dimana berfungsi sebagai sebuah kota dengan fungsi tidak hanya melayani wilayah

Kota Palopo itu sendiri, tetapi juga bagi wilayah Kabupaten terdekat/tetangganya (*Hinterland*).

2. Fungsi Jasa

Fungsi jasa dilihat berdasarkan jenis fasilitas, skala pelayanan, dan jumlah fasilitas jasa yang merupakan indikator yang menentukan seberapa besar optimalisasi fungsi pada Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Fasilitas Jasa Perbankan dan Keuangan

Kota/Kabupaten	Jumlah Fasilitas Jasa Perbankan dan Keuangan
Palopo	16
Luwu	10
Luwu Utara	10
Luwu Timur	9

Sumber : Observasi, Tahun 2016

3. Fungsi Perdagangan

Pelayanan fasilitas perdagangan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini sangat menunjang dalam perkembangan kota, selain fungsinya sebagai sarana untuk berbelanja juga berfungsi sebagai pendistribusi barang kebutuhan masyarakat. Hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas perdagangan di Kota Palopo berupa pasar induk, pasar tradisional, toko (pertokoan/ruko), serta pusat perdagangan modern (Mall) dan pasar modern lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Fasilitas Perdagangan
Sumber : Observasi Langsung, Tahun 2016

Tabel 4.8 Fasilitas Perdagangan

Kota / Kabupaten	Fasilitas Perdagangan			Total
	Pasar Modern	Pasar Regional	Pasar Lokal	
Palopo	4	1	3	8
Luwu Timur	0	1	5	6
Luwu	0	0	5	5
Luwu Utara	0	0	6	6
Jumlah	4	2	19	25

Sumber : Observasi Langsung, 2016

4. Fungsi Pendidikan

Sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan dapat dirasakan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, taraf hidup dan pekerjaan. Keberhasilan itu dapat dicapai antara lain dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar melalui peningkatan usaha pembinaan, pengembangan dan potensi sumberdaya manusia, terutama dengan memperluas fasilitas dan meningkatkan mutu pendidikan.

Kota Palopo telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warganya mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SMU/SMK hingga Perguruan

Tinggi, sehingga untuk warga di sekitar Palopo (kabupaten dan bakorwil) yang menginginkan pendidikan yang lebih memadai atau lebih tinggi dari pada yang dimiliki di wilayahnya, biasanya memilih atau melanjutkan di Kota Palopo. Diantara banyak sekolah yang ada di Kota Palopo yang banyak menjadi pilihan warga sekitar Palopo (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja dan lainnya) seperti SMU Negeri 1, 2 dan 3, SMK 1 dan SMK 3, SMK Keperawatan/Kebidanan/Farmasi, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadiyah, STIK/Akademi Kesehatan/ Kebidanan dan Universitas Veteran Cokroaminoto. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.9 Fasilitas Pendidikan

No	Kota/Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	PT	Total
1	Kota Palopo	210	79	28	34	10	361
2	Luwu Timur	153	73	27	31	2	286
3	Luwu	196	75	25	29	2	327
4	Luwu Utara	146	71	25	39	2	283
Jumlah		705	298	105	133	16	1.257

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2016



Gambar 4.4 Fasilitas Pendidikan

Sumber : Survei Lapangan, 2016

5. Fungsi Kesehatan

Fungsi kesehatan selain berfungsi sebagai tempat pengobatan juga berperan dalam sistem distribusi pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan bagi masyarakat untuk mewujudkan pola hidup sehat dan layak. Sumber data yang diperoleh menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Palopo berjumlah terdiri atas rumah sakit, puskesmas, dan rumah bersalin. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.10 Fasilitas Kesehatan

No	Kota/Kabupaten	RS dan RSB	Puskesmas	Total
1	Kota Palopo	5	12	17
2	Luwu Timur	2	15	17
3	Luwu	1	22	23
4	Luwu Utara	2	75	77
Jumlah		10	124	134

Sumber : Observasi Langsung, 2016

6. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum terdiri dari fasilitas telekomunikasi, kelistrikan, pajak, serta pos/pengiriman. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Fasilitas Pelayanan Umum

No	Kota/Kabupaten	PLN	Telekomunikasi	Pos	Pajak
1	Kota Palopo	1	1	1	1
2	Luwu	-	-	1	-
3	Luwu Utara	-	-	1	-
4	Luwu Timur	-	1	1	1
Jumlah		1	2	4	2

Sumber : Observasi Langsung, 2016

7. Fungsi Transportasi

a. Transportasi Darat Jaringan Jalan

Jaringan transportasi darat Kota Palopo merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam ruang wilayah Kota Palopo sehingga menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat pelayanan kegiatan dengan sektor ekonomi masyarakat.

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang terbelakang. Selain itu fungsi jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman. Jaringan jalan di Kota Palopo terdiri dari :

- 1) Jalan arteri dengan status jalan lingkar timur
- 2) Kolektor
- 3) Lokal.

Kondisi jalan di Kota Palopo pada Umumnya terdiri atas jalan aspal, pengerasan dan jalan beton. Sedangkan berdasarkan klasifikasi fungsi jaringan jalan dilalui oleh jalan arteri sebagai jalur utama, sedangkan penghubung antar kawasan dan lingkungan permukiman dilalui oleh jalan

kolektor dan jalan lokal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 4.5 Jaringan Jalan (Arteri, Kolektor, Lokal)

Sumber : Observasi Langsung, 2016

b. Transportasi Laut

Dilihat dari tingkat kepadatan arus lalu lintas (muatan barang dan kendaraan bermotor), angkutan pada ruas-ruas jalan raya di bagian utara Kota Palopo yang relatif tertinggi dibandingkan dengan lainnya. Hal ini dapat dijelaskan karena angkutan pada jalur tersebut menghubungkan ke dan dari 2 (dua) simpul terbesar yang memiliki fasilitas pelabuhan laut dan Bandara udara. Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo merupakan pelabuhan khusus, artinya pelabuhan khusus penyeberangan kapal Ferry. Fungsi ini berbeda dengan keberadaan pelabuhan umum seperti Pelabuhan Soekarno - Hatta di Makassar.

Aktivitas pelabuhan Tanjung Ringgit sebagai pelabuhan alam yang melayani kegiatan bongkar muat khususnya barang-barang hasil pertanian, perkebunan di samping itu juga melayani kegiatan embarkasi dan

debarkasi penumpang kebeberapa pulau terutama di Kalimantan, baik itu di Balikpapan, Samarinda, Bontang dan lain-lain. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Ringgit di Palopo sudah bisa melayani kapal-kapal pembawa kontainer dari Surabaya dan ke depannya, pelabuhan ini akan terus dikembangkan agar bisa menjadi pelabuhan kontainer terbesar ke-3 di Sulawesi Selatan.

c. Transportasi Udara

Bandar Udara di Kota Palopo adalah bandar udara Lagaligo merupakan salah satu bandara bertaraf domestik yang terletak di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 10 Km dari Kota Palopo. Bandar Udara Lagaligo mempunyai runway/landasan pacu sepanjang 1.400 x 30 meter dan mempunyai kekuatan runway 12 F/C/T(PCN). Yang mampu melayani penerbangan rute regional yakni Bua-Makassar, Bua-Surabaya, Bua-Jakarta, dan Bua-Halim Perdana Kusuma Jakarta, dengan tipe pesawat ATR 72-600. Namun rute ini masih tetap transit di Makassar. Beberapa lapangan terbang (lapter) perintis yaitu lapangan terbang Andi Jemma di Masamba (Kabupaten Luwu Utara), dan Bandara Sorowako (Luwu Timur). Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Fasilitas Transportasi

Kota/kabupaten	Darat	Laut	Udara
Palopo	6	2	-
Luwu	4	-	1
Luwu Utara	4	-	1
Luwu Timur	5	1	1

Sumber : Observasi Langsung, 2016

8. Fungsi Wisata dan Rekreasi

Fungsi wisata dan rekreasi merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi besar bagi suatu daerah atau negara. Selain itu, pariwisata juga dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Fasilitas Wisata, Rekreasi dan Penunjang Pariwisata

Kota / Kabupaten	Hotel	Kamar	Objek Wisata	Wisatawan Domestik (Jiwa)	Wisatawan Asing
Palopo	10	560	15	95.871	52
Luwu	6	130	15	10.795	-
Luwu Utara	4	110	17	15.004	-
Luwu Timur	9	390	13	45.687	48
Jumlah	29	1.190	57	167.357	100

Sumber : Observasi Langsung, 2016

9. Fungsi Hiburan

Fungsi hiburan di Kota Palopo terdiri dari fasilitas hiburan keluarga, dewasa, dan anak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Fasilitas Hiburan

Kota/Kabupaten	Keluarga	Dewasa	Anak	Total
Palopo	3	5	5	13
Luwu	2	2	1	5
Luwu Utara	3	2	2	7
Luwu Timur	5	3	3	11
Jumlah	13	12	11	36

Sumber : Observasi, Tahun 2016

10. Fungsi Industri

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Fasilitas Industri

Kota/Kabupaten	Besar	Sedang	Kecil	Total
Palopo		35	49	104
Luwu	3	12	34	49
Luwu Utara		30	53	83
Luwu Timur	6	42	54	102
Jumlah	9	119	190	338

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2016

Industri yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur merupakan jenis industri manufaktur. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu : industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang/menengah (20-99 orang pekerja), industri kecil (5-19 orang pekerja), dan industri mikro (1-4 orang pekerja).

11. Fungsi Pergudangan

Pergudangan merupakan segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, dan pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik agar kualitas dan

kuantitas tetap terjamin. Jenis fasilitas pergudangan terdiri dari fasilitas pergudangan berupa kawasan pergudangan teraglomerasi dan kawasan pergudangan tidak teraglomerasi. Adapun jumlah fasilitas pergudangan sesuai dengan jenis fasilitas pergudangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Fasilitas Pergudangan

Kota/Kabupaten	BUMD	Swasta	Total
Palopo	1	2	3
Luwu	-	2	2
Luwu Utara	-	2	2
Luwu Timur	-	3	3
Jumlah	1	9	10

Sumber : Observasi Langsung, 2016

Tabel diatas menunjukkan jumlah fasilitas pergudangan masing-masing Kota/Kabupaten tidak merata baik BUMD maupun swasta. Fasilitas pergudangan tertinggi terdapat di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah fasilitas pergudangan 3 unit, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu dengan jumlah fasilitas pergudangan 2 unit.

BAB V

ANALISA

A. Fungsi Pelayanan Pusat

Friedman dalam Adisamita (2010:10) mengidentifikasi kota sebagai wilayah inti yang berperan sebagai pusat pelayanan dan pusat pembangunan. Dalam pembangunan spasial, wilayah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya melalui sistem suplai, pasar dan daerah administratif. Wilayah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan inovasi ke daerah-daerah di sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya. Proses wilayah-wilayah inti mengkonsolidasikan perannya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan wilayah inti, yang terdiri dari pengaruh dominasi, pengaruh informasi, pengaruh psikologis, pengaruh matarantai, dan pengaruh produksi.

Gejala menunjukkan bahwa kota yang agak besar merupakan stimulator, (walaupun tidak selamanya) untuk melangsungkan transisi atau peralihan dari masyarakat ekonomi yang berdasar pertanian kepada masyarakat ekonomi yang maju yang memiliki tingkat produktifitas tinggi dan kegiatan yang luas di daerah sekitar kota dan bahkan sampai di daerah pedalaman (Adisasmita, 2010: 15).

Di lihat dari jumlah dan jenis ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kota yang ada di Kota Palopo dibanding dengan sarana dan prasarana di kota-kota lainnya yang ada di sekitarnya seperti perkotaan Masamba, Belopa, dan Malili,

maka yang tersedia saat ini di Kota Palopo jauh lebih representatif, baik dari segi jumlah, jenis, maupun cakupan pelayanannya.

Fungsi dari kota-kota yang diamati dapat dilihat dari beberapa segi fungsi pelayanan, yaitu :

Tabel 5.1 Kriteria/Parameter Fungsi Pelayanan

No	Kriteria/Parameter
1.	Fungsi Pemerintahan
2.	Fungsi Jasa
3.	Fungsi Perdagangan
4.	Fungsi Pendidikan
5.	Fungsi Kesehatan
6.	Fungsi Pelayanan Umum
7.	Fungsi Transportasi
8.	Fungsi Wisata dan Rekreasi
9.	Fungsi Hiburan
10.	Fungsi Industri
11	Fungsi Pergudangan

B. Penjelasan Masing – masing Indikator Fungsi

Jumlah penduduk merupakan daya pelayanan berdasarkan batas ambang setiap fungsi pelayanan yang mendasar pada jumlah fasilitas pelayanan. Fungsi pelayanan dalam studi ini dikategorikan pada fungsi pemerintahan, jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, wisata dan rekreasi, transportasi, pelayanan umum, pergudangan, dan industri. Hasil Tabulasi Skalogram Indeks Sentralitas dan Skala Guttman dari Keragaman Fungsi Pelayanan.

1. Skalogram Indeks Sentralitas

a. Fungsi pemerintahan masing-masing kota tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas
Fungsi Pemerintahan**

Kota/Kabupaten	Ibukota Dati II	IST	Rangking
Palopo	(1)√ (2)√	86,6	I
Luwu	-	73,3	II
Luwu Utara	-	59,3	IV
Luwu Timur	-	66,6	III

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Catatan: (1). Kota

(2). Beberapa instansi yang mempunyai wilayah kerja lebih luas

Fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dimana berfungsi sebagai sebuah kota dengan fungsi tidak hanya melayani wilayah Kota Palopo itu sendiri, tetapi juga bagi wilayah Kabupaten terdekat/tetangganya (Hinterland). Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (86,6) diberikan rangking I karena memiliki fungsi pemerintahan dengan skala pelayanan regional. Sedangkan Kabupaten Luwu Utara dengan nilai skalogram terendah (59,3) diberikan rangking IV.

b. Fungsi Jasa

Fungsi jasa dilihat berdasarkan jenis fasilitas, skala pelayanan, dan jumlah fasilitas jasa yang merupakan indikator yang menentukan seberapa besar optimalisasi fungsi pada Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Jasa

Kota/Kabupaten	IST	Rangking
Palopo	35,55	I
Luwu	22,22	II
Luwu Utara	22,22	II
Luwu Timur	20	III

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Kota Palopo berfungsi sebagai simpul jasa yang berorientasi pada pelayanan Regional (bahkan antar nasional). Selain itu Kota Palopo juga mampu melayani beberapa Kabupaten terdekat/tetangga. Untuk itu Kota Palopo diberi rangking I dengan nilai IST (35,55).

c. Fungsi Perdagangan

Fungsi perdagangan berkaitan langsung dengan fasilitas kebutuhan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini sangat menunjang dalam perkembangan kota, selain fungsinya sebagai sarana untuk berbelanja juga berfungsi sebagai pendistribusi barang kebutuhan masyarakat untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Perdagangan

Berdasarkan Fasilitas Perdagangan

Kota / Kabupaten	Fasilitas Perdagangan			IST	Rangking
	Pasar Modern	Pasar Regional	Pasar Lokal		
Palopo	100	50	15,78	165,78	I
Luwu Timur	0	50	26,31	76,31	II
Luwu	0	0	26,31	26,31	IV
Luwu Utara	0	0	31,57	31,57	III

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (165,78) diberikan rangking I, karena memiliki jumlah fasilitas perdagangan terbanyak yang terdiri dari Pasar Modern (Mall), Pasar Regional dan Pasar Lokal dengan skala pelayanan fasilitas perdagangan berskala pelayanan regional; kemudian disusul Kabupaten Luwu Timur dengan rangking II (76,31); Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang keduanya dengan rangking III dan IV (masing-masing nilainya 31,57 dan 26,31).

d. Fungsi Pendidikan

Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Fungsinya sebagai pusat kegiatan pendidikan dapat meliputi perguruan tinggi/institut (negeri dan swasta), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan lainnya.

Untuk membandingkan Kota Palopo dengan Kabupaten sekitarnya (Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur) akan dilihat pada jumlah fasilitas pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.4 berikut pada Lampiran.

Tabel 5.5 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Pendidikan berdasarkan Fasilitas Pendidikan

Kota / Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	PT	IST	Rangking
Palopo	29,82	26,465	26,656	25,534	62,5	170,975	I
Luwu	27,722	25,125	23,8	21,896	12,5	111,043	II

Luwu Utara	20,732	23,965	23,8	29,289	12,5	110,276	III
Luwu Timur	21,726	24,455	25,744	23,281	12,5	107,706	IV

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (170,975) diberikan ranking I karena memiliki jenis fasilitas terdiri dari perguruan tinggi, pendidikan akademi/D3 hingga pendidikan taman kanak-kanak serta Kota Palopo memiliki jumlah fasilitas pendidikan terbanyak dengan skala pelayanan regional. Sedangkan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai skalogram terendah (107,706) diberikan ranking IV.

e. Fungsi Kesehatan

Fungsi kesehatan selain berfungsi sebagai tempat pengobatan juga berperan dalam sistem distribusi pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan bagi masyarakat untuk mewujudkan pola hidup sehat dan layak.

Fungsinya sebagai pusat pelayanan kesehatan, pada umumnya dilihat dari jumlah rumah sakit, rumah bersalin dan puskesmas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Kesehatan

Kota / Kabupaten	Nilai Skalogram RS dan RSB	Nilai Skalogram Puskesmas	IST	Rangking
Palopo	50	60,75	110,75	I
Luwu	10	17,82	27,82	IV
Luwu Utara	20	9,28	29,28	III
Luwu Timur	20	12,15	32,15	II

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (110,75) diberikan ranking I karena memiliki jenis fasilitas terdiri dari RSUD pemerintahan, RSUD swasta, serta rumah sakit khusus. serta Kota Palopo memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak dengan skala pelayanan regional; Kabupaten Luwu Timur dengan ranking II (32,15); kemudian disusul Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang keduanya berimbang (masing-masing nilainya 29,28 dan 27,82).

f. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum terdiri dari fasilitas telekomunikasi, kelistrikan, pajak, serta pos/pengiriman. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.7 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas
Fungsi Pelayanan Umum**

Kota / Kabupaten	Kelistrikan	Telekomunikasi	Pos / Pengiriman	Pajak	IST	Rangking
Palopo	100	50	25	33,33	208,33	I
Luwu	-	-	25		25	IV
Luwu Utara	-	-	25	33,33	58,33	III
Luwu Timur	-	50	25	33,33	108,33	II

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (208,33) diberikan ranking I selain itu skala pelayanan fasilitas pelayanan umum meliputi skala/cakupan pelayanan wilayah (regional). Sedangkan Kabupaten Luwu dengan nilai skalogram terendah (25) diberikan ranking IV.

g. Fungsi Transportasi

Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia, dan menunjang perkembangan pembangunan (*the promoting sector*). Selain itu, Fungsi transportasi dapat dilihat berdasarkan jenis fasilitas, skala pelayanan, dan jumlah fasilitas transportasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Transportasi Berdasarkan Jenis Fasilitas Transportasi

Kota / Kabupaten	Darat	Laut	Udara	IST	Rangking
Palopo	31,57	66,66	-	98,24	I
Luwu	21,05	0	33,33	54,38	III
Luwu Utara	21,05	0	33,33	54,38	III
Luwu Timur	26,31	33,33	33,33	92,98	II

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (98,24) diberikan rangking I selain itu skala pelayanan fasilitas transportasi meliputi skala/cakupan pelayanan wilayah (regional). Kab. Luwu Timur diberikan peringkat II dengan nilai IST (92,98). Kab. Luwu dan Luwu Utara diberikan peringkat III dengan nilai IST (54,38).

h. Fungsi Wisata dan Rekreasi

Fungsi wisata dan rekreasi merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi besar bagi suatu daerah atau negara. Selain itu, pariwisata juga dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Fungsinya sebagai pusat pelayanan wisata dan rekreasi dapat dilihat dari jumlah wisatawan, objek wisata, fasilitas penunjangnya. Berdasarkan data yang tersedia menurut 4 (empat) Kota/Kabupaten yang diamati maka yang akan ditampilkan adalah data wisatawan, objek wisata, fasilitas penunjangnya yaitu jumlah hotel (unit), jumlah kamar hotel, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Wisata dan Rekreasi

Kota / Kabupaten	Hotel	Kamar	Objek Wisata	Wisatawan Domestik (Jiwa)	Wisatawan Asing	IST	Rangking
Palopo	34,48	47,05	25	57,28	52	215,82	I
Luwu	20,68	10,92	25	6,45	-	63,06	III
Luwu Utara	13,79	9,24	28,33	8,96	-	60,33	IV
Luwu Timur	31,03	32,77	21,66	27,29	48	160,77	II

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (215,82) diberikan rangking I, karena memiliki jumlah pengunjung wisatawan domestik dan wisatawan asing tertinggi. Selain itu, Kota Palopo juga telah memiliki fasilitas hotel berbintang 2. Walaupun jumlah objek wisata Kota Palopo dengan nilai skalogram rendah tetapi jumlah pengunjung sangat banyak dan mampu menarik wisatawan asing untuk berkunjung. Oleh sebab itu, skala pelayanan fasilitas pelayanan pariwisata berskala pelayanan regional; Kabupaten Luwu Timur dengan rangking II (160,77); kemudian disusul Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang keduanya dengan rangking III dan IV (masing-masing nilainya 63,06 dan 60,33).

i. Fungsi Hiburan

Fungsi hiburan terdiri dari beberapa fasilitas dan jenis hiburan dan skala pelayanan fasilitas hiburan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Nilai Skalogram Indeks Sentralitas Fungsi Hiburan Berdasarkan Fasilitas Hiburan

Kota / Kabupaten	Hiburan Dewasa	Hiburan Keluarga	Hiburan Anak	IST	Rangking
Palopo	23,07	41,66	45,45	110,19	I
Luwu	15,38	16,66	9,09	41,14	IV
Luwu Utara	23,07	16,66	18,18	57,92	III
Luwu Timur	38,46	25	27,27	90,73	II

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Kota Palopo dengan nilai IST tertinggi (110,19) diberikan rangking I, karena memiliki jumlah fasilitas terbanyak. Selain itu, Kota Palopo berskala pelayanan fasilitas hiburan meliputi skala/cakupan pelayanan wilayah (regional), skala/cakupan pelayanan Kota Palopo dan sekitarnya. Kabupaten Luwu Timur dengan rangking II (90,73); kemudian disusul Kabupaten Luwu dan Luwu Utara yang keduanya dengan rangking III dan IV (masing-masing nilainya 57,92 dan 41,14).

j. Fungsi Industri

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat

kepada pemakai akhir. industri yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur merupakan jenis industri manufaktur. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu : industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang/menengah (20-99 orang pekerja), industri kecil (5-19 orang pekerja), dan industri mikro (1-4 orang pekerja). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Nilai Skalogram Indeks sentralitas Fungsi Industri Berdasarkan Jenis Industri

Kota / Kabupaten	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Kecil	IST	Rangking
Palopo	-	25,17	25,78	50,96	III
Luwu	33,33	8,63	17,89	59,86	II
Luwu Utara	-	21,58	27,89	49,47	IV
Luwu Timur	66,66	30,21	28,42	125,30	I

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Konsentrasi industri terdapat di Kabupaten Luwu Timur dan menduduki peringkat teratas untuk semua jenis industri khususnya pada industri logam dasar salah satunya adalah nikel. Kabupaten Luwu Timur dengan nilai IST tertinggi (125,30) diberikan rangking I, karena berada dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki skala pelayanan fasilitas pelayanan Industri berskala pelayanan regional; Kabupaten Luwu Utara dengan rangking IV terendah dengan nilai skalogram (49,47).

k. Fungsi Pergudangan

Pergudangan merupakan segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, dan pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Jenis fasilitas pergudangan terdiri dari fasilitas pergudangan berupa kawasan pergudangan teraglomerasi dan kawasan pergudangan tidak teraglomerasi. Adapun jumlah fasilitas pergudangan sesuai dengan jenis fasilitas pergudangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Nilai Skalogram Indeks sentralitas Fungsi Pergudangan Berdasarkan Jumlah Pergudangan

Kota / Kabupaten	Skalogram BUMD	Skalogram Swasta	IST	Rangking
Palopo	100	22,22	122,22	I
Luwu	-	22,22	22,22	III
Luwu Utara	-	22,22	22,22	IV
Luwu Timur	-	33,33	33,33	II

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Konsentrasi pergudangan terdapat di Kota Palopo dan menduduki peringkat teratas untuk semua jenis pergudangan dengan nilai IST (122,22) rangking I. Selain itu, skala pelayanan fasilitas pergudangan meliputi skala/cakupan pelayanan regional; Kab. Luwu Timur dengan nilai IST (106,7) diberikan rangking II; Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara dengan nilai IST (22,22) dengan rangking (III dan IV).

C. Skala Guttman

Analisis Skala Guttman disamping dapat menentukan hierarki suatu Kota/Kabupaten sebagai pusat-pusat pengembangan, juga dapat memberikan informasi tentang distribusi tingkat perkembangan pada masing-masing wilayah pembangunan yang dilayani oleh pusat pengembangan tersebut. Hal ini dengan asumsi bahwa pusat pengembangan yang memiliki hierarki lebih tinggi diharapkan memiliki fasilitas dengan jumlah dan ukuran tertentu secara berjenjang. Apabila suatu fasilitas yang terdapat pada pusat pengembangan yang lebih rendah hierarkinya tetapi tidak terdapat pada pusat pengembangan yang lebih tinggi maka dianggap sebagai suatu kesalahan.

Hasil analisis skalogram ditemukan bahwa 11 fasilitas pelayanan yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur besarnya fungsi pelayanan antar pusat satuan wilayah pengembangan di Kota Palopo, Kab. Luwu. Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur.

Bahwa untuk memperoleh hirarki yang baik maka terdapat 2 fungsi pelayanan yang dideleniasi yaitu fungsi Pergudangan dan industri sehingga fungsi pelayanan berkurang menjadi 9 fungsi pelayanan. Hal ini disebabkan karena fungsi tersebut dimiliki oleh pusat pengembangan dengan hirarki yang lebih rendah tapi tidak dimiliki oleh pusat pengembangan dengan hirarki yang lebih tinggi.

Diperoleh hasil bahwa distribusi fungsi pelayanan antar pusat pengembangan di Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 5.13 Distribusi Fungsi Pelayanan Pusat Pengembangan
Berdasarkan Skala Guttman**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk	Skor Skala			Skala Jenjang/ Hirarki
			Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Fungsi	Persentase (%)	Level
1	Palopo	168.894	247,52	9	81,81	I
2	Luwu	302.687	3.000,25	7	63,63	III
3	Luwu Utara	275.595	7.502,58	8	72,72	II
4	Luwu Timur	350.218	6.944,88	9	81,81	I

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Tabel tersebut memberikan hasil bahwa Kota Palopo dan Kab. Luwu Timur berada pada hirarki pertama dengan fungsi sebesar 81,81%. Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu berada pada hierarki kedua dan ketiga dengan jumlah fungsi sebesar 72,72% dan 63,63%.

Hal ini memberikan arti bahwa dominasi Kota Palopo (81,81%) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) masih relatif lemah, yang artinya bahwa fungsi Kota Palopo hingga saat ini belum optimal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau kawasan perkotaan yang berfungsi melayani skala/cakupan regional. Kab. Luwu Timur juga dominasinya sama dengan Kota Palopo (81,81%), Kab. Luwu Utara dengan jumlah fungsi sebesar 72,72% dan Kab. Luwu dengan jumlah fungsi sebesar 63,63%. Hal ini dapat mengakibatkan Kota Palopo tidak menjadi pusat orientasi utama dari Kabupaten yang berada dibawah wilayah pengaruhnya. Fakta tersebut bila

dikontekskan terhadap pemikiran Myrdal (Richardson, 1977) bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan *back-wash effect* yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai terbangun, sehingga daerah lain dan daerah sekitarnya menjadi mundur dan terbelakang. Namun kondisi fakta dilapangan menunjukkan bahwa daerah hinterland wilayah Kota Palopo meliputi Kab. Luwu, Kab. Luwu timur, dan Kab. Luwu Utara kecenderungan berkembang pusat-pusat pelayanan untuk melayani skala regional wilayah masing-masing sehingga skala pengaruh pusat pelayanan utama Kota Palopo tidak begitu memberikan pengaruh terhadap daerah sekitar. Sehingga setiap pusat pengembangan relatif akan tumbuh dan berkembang secara kohesif. Kondisi seperti ini dalam pengalokasian sumber-sumber pembangunan pada struktur ruang menjadi tidak efisien.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis skalogram serta indeks sentralitas terbobot maka hasil uji statistik pada skala guttman yaitu hasil perhitungan Koefisien Reprodusibilitas (K_r) serta Koefisien Skalabilitas (K_s), menunjukkan nilai $K_r = 0,82$ dan nilai $K_s = 0,6$.

Jika diamati berdasarkan fungsi dan jenis fasilitas, maka fungsi yaitu jasa, perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, hiburan, pemerintahan, pergudangan, transportasi, wisata dan rekreasi, dan pelayanan umum. Hal ini memberikan informasi bahwa Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur memiliki kemampuan yang sama untuk menarik berbagai kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing. Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan kemampuan perkembangan setiap daerah terutama Kota

Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana yang telah diarahkan pada Rencana Tata Ruang Nasional (RTRW Nasional) dan Propinsi Sulawesi Selatan (RTRW Propinsi Sulawesi Selatan).

D. Luas Jangkauan Wilayah Pengaruh Pusat-pusat Pelayanan

1. Hukum Gravitasi

Luas jangkauan wilayah pengaruh pusat-pusat pelayanan dihitung dengan menggunakan rumus gravitasi (Hukum Reilly), Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Menentukan kekuatan relatif dari hubungan komersial antara pusat pembangunan di Kota Palopo dengan pusat pembangunan Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur.

Tabel 5.14 Matriks Jarak (Km) dan Jumlah Penduduk (Jiwa) Antar Pusat Pembangunan

No	Jarak “Dari” Kota/Kabupaten Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jarak “Ke” Kota/Kabupaten			
			Palopo (Km)	Luwu (Km)	Luwu Utara (Km)	Luwu Timur (Km)
1	Palopo	168.894	-	59,3	154,1	230
2	Luwu	302.218	59,3	-	119,3	289,3
3	Luwu Utara	275.595	154,1	119,3	-	170
4	Luwu Timur	350,218	230	289,3	170	-

Sumber : Observasi Langsung, 2017

Berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar Kota/Kabupaten dan dengan menggunakan elaborasi formulasi rumus gravitasi dapat dihitung batas gaya tarik geografis antar pusat pembangunan pada Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur. Semakin besar gaya tarik suatu pusat pembangunan terhadap pusat pembangunan lainnya maka semakin besar tingkat interaksi yang terjadi antar pusat pembangunan tersebut. Tingkat interaksi ini menggambarkan jangkauan pelayanan setiap kecamatan. Semakin besar jangkauan pelayanannya maka semakin besar peranannya dalam pengembangan wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table matriks interaksi Kota Palopo terhadap hinterland.

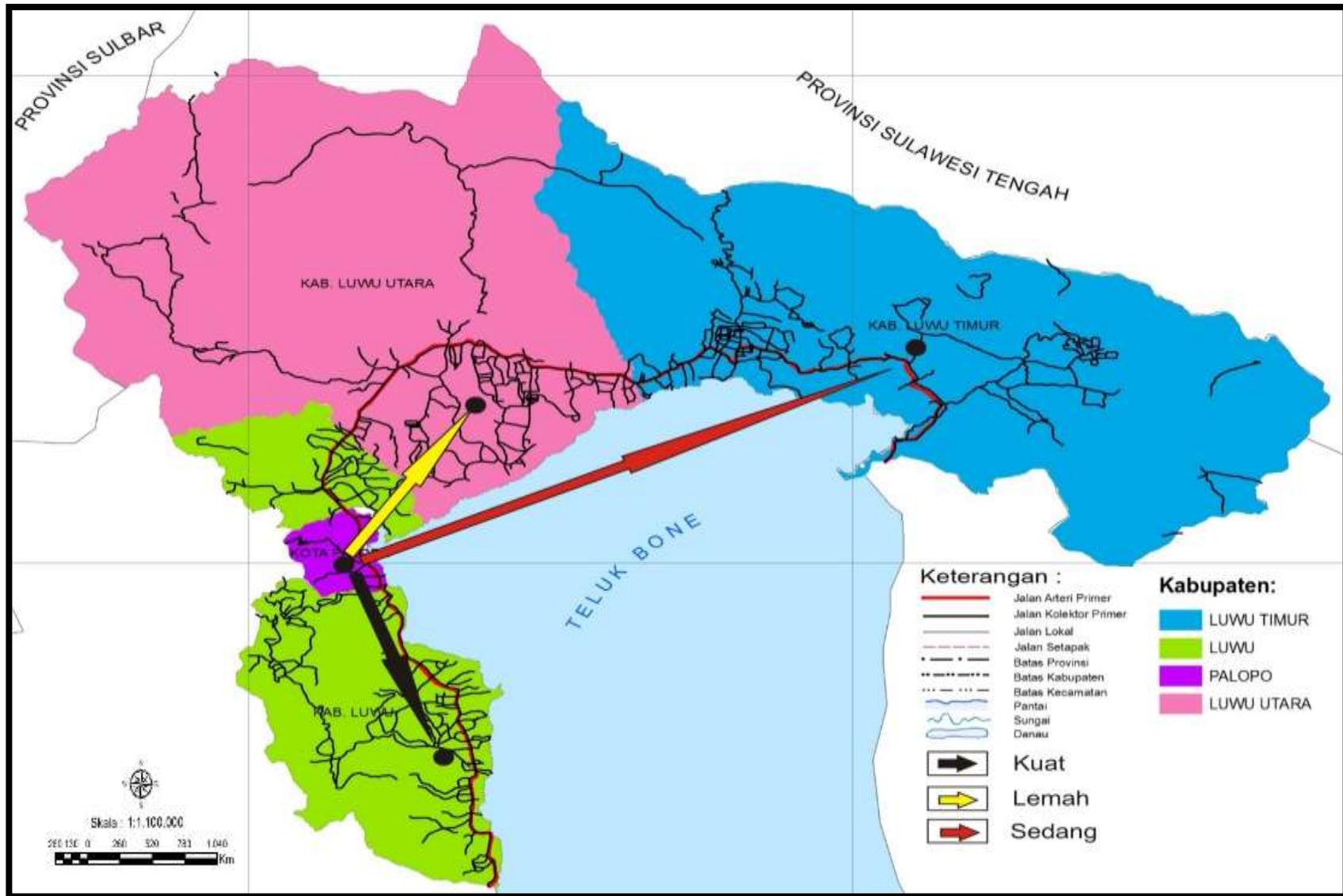
**Tabel 5.15 Matriks Interaksi Kota Palopo
Terhadap Hinterland**

No	Interaksi “Dari” Kota/Kabupaten		Interaksi “Ke” Kota/Kabupaten
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
1	Palopo	168.894	-
2	Luwu	302.218	14515271,45
3	Luwu Utara	275.595	12929539,43
4	Luwu Timur	350,218	1118,142134

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan dan dengan menggunakan formulasi rumus gravitasi dapat dihitung besarnya interaksi antar Kota Palopo terhadap Kabupaten Luwu sebesar 14515271,45 hal ini membuktikan bahwa interaksi Kota Palopo terhadap Kabupaten Luwu sangat kuat, Interaksi Kota Palopo terhadap Kabupaten Luwu Utara sebesar

12929539,43 dengan interaksi sedang, dan interaksi Kota Palopo terhadap Kabupaten Luwu Timur sebesar 1118,142134 dengan interaksi lemah. Semakin besar gaya tarik suatu kota terhadap kota lainnya maka semakin besar tingkat interaksi yang terjadi antar kota tersebut. Tingkat interaksi ini menggambarkan jangkauan pelayanan pusat pembangunan Kota Palopo terhadap hinterland. Semakin besar jangkauan pelayanannya maka semakin besar peranannya dalam pengembangan wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Peta Interaksi Pusat Pelayanan Kota Palopo Terhadap Daerah Hinterland

Sumber: Hasil Analisis, 2017

2. Titik Henti (Breaking Point)

Teori Titik Henti (Breaking Point Theory) merupakan hasil modifikasi dari Model Gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan suatu wilayah dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori Titik Henti juga dapat digunakan dalam menghitung luas jangkauan suatu wilayah penempatan lokasi atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Jangkauan Wilayah Pengaruh Kota Palopo terhadap Hinterland

No	Jarak “Dari” Kota/Kabupaten		Jarak “Ke” Kota/Kabupaten
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
1	Palopo	168.894	-
2	Luwu	302.218	25,37
3	Luwu Utara	275.595	67,67
4	Luwu Timur	350,218	94,30

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis gravitasi dan titik henti menunjukkan radius pengaruh pusat pelayanan Kota Palopo terhadap daerah hinterland dengan jarak cakupan pelayanan sebagai berikut:

Untuk Kota Palopo – Kab. Luwu

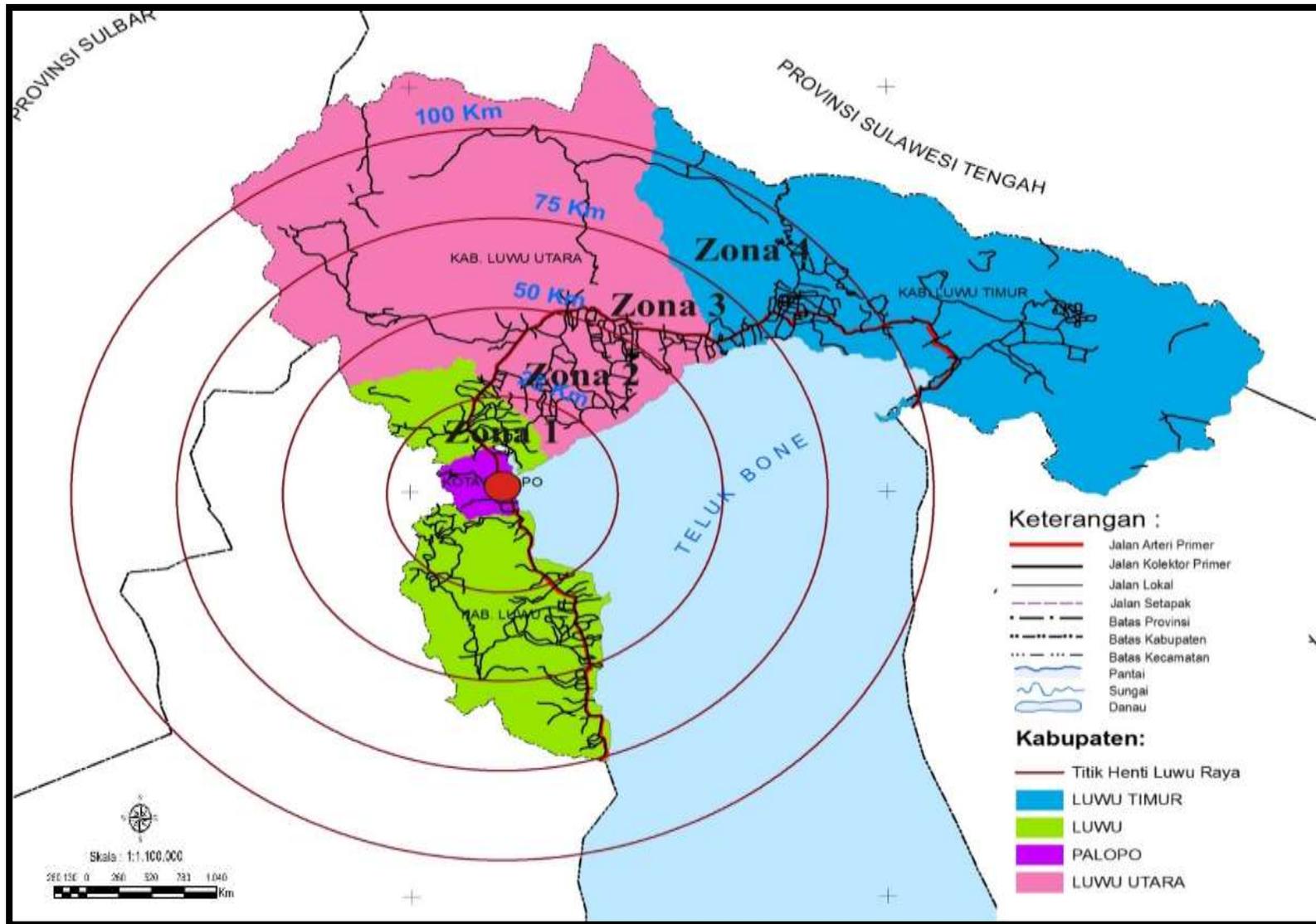
Kota Palopo secara geografis dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu pada radius sejauh 25,37 Km. Semakin besar angka radius antar Kota Palopo dengan Kab. Luwu maka semakin luas jangkauan pelayanan antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya.

Untuk Kota Palopo – Kab. Luwu Utara

Kota Palopo secara geografis dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 67,67 Km. Semakin besar angka radius antar Kota Palopo dengan Kab. Luwu Utara maka semakin luas jangkauan pelayanan antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya.

Untuk Kota Palopo – Kab. Luwu Timur

Kota Palopo secara geografis dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 94,30 Km. Semakin besar angka radius antar Kota Palopo dengan Kab. Luwu Timur maka semakin luas jangkauan pelayanan antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya.



Gambar 5.2 Peta Radius Jangkauan Pelayanan Kota Palopo Terhadap Daerah Hinterland

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 5.2 diatas menunjukkan radius pengaruh pusat pelayanan Kota Palopo terhadap daerah hinterland dapat diinterpretasi sebagai berikut: **Pertama**, Radius terjauh terdapat di Zona 4 dengan jarak 94,30 Km yang berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur dikarenakan secara geografis jarak Luwu Timur dengan pusat pelayanan di Kota Palopo cukup jauh serta radius pusat pelayanan di Kota Palopo tidak mencakup keseluruhan wilayah di Kabupaten Luwu Timur dikarenakan fungsi pelayanan di Kab. Luwu Timur yang berkembang di Malili dan Mangkutana mampu mencakup skala regional wilayah Kab. Luwu Timur. **Kedua**, Radius pengaruh pusat pelayanan Kota Palopo terhadap wilayah Kab. Luwu Utara terdapat pada Zona 2 dan Zona 3 dengan titik henti pengaruh sejauh 67,67 Km. **Ketiga**, pengaruh pusat pelayanan di Kota Palopo terhadap wilayah Kab. Luwu merupakan wilayah terdekat secara geografis dengan wilayah Kota Palopo dan terdapat pada Zona 1 dengan titik pengaruh 25,37 Km, proses tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan pusat pelayanan di Kota Palopo sangat dipengaruhi secara spasial oleh wilayah hinterland Kabupaten Luwu, hal ini ditandai dengan pola interaksi ruang yang sangat kuat antara pusat pelayanan Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu sehingga dalam penyelenggaraan pengembangan pusat pelayanan pada dua wilayah tersebut saling mempengaruhi. Sejalan dengan pemikiran Martínez Toro, (2016) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan wilayah, jaringan pusat kota inti mempengaruhi pusat-pusat kota di daerah hinterland sebagai wilayah pengaruhnya.

D. Implikasi Temuan Teori

Boudeville mengemukakan bahwa suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks, dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Terbentuknya pusat pertumbuhan dapat terjadi secara alami atau dengan perencanaan. Maka terkait dengan hal itu, penelitian ini mengungkap bahwa melalui perencanaan yakni penetapan Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi daerah-daerah hinterland belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam teori efektivitas (Mahmudi; 2013), implikasi penetapan fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) relatif lemah. Dimana hasil di capai hingga saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena fungsi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai dengan hasil penelitian ini masih relatif lemah, hanya memperoleh nilai sebesar 81,81%.

Berangkat dari pemikiran Myrdal (Richardson, 1977) bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan *back-wash effect* yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai terbangun, sehingga daerah lain dan daerah sekitarnya menjadi mundur dan terbelakang. Dalam penelitian ini terungkap bahwa daerah hinterland wilayah Kota Palopo yang meliputi Kab. Luwu, Kab. Luwu timur, dan Kab. Luwu Utara kecenderungan berkembang pusat-pusat pelayanan untuk melayani skala regional wilayah masing-masing, sehingga skala pengaruh pusat pelayanan utama Kota Palopo tidak memberikan pengaruh terhadap daerah sekitar. Proses tersebut bila diproposisikan terhadap pemikiran Myrdal maka

terjadi pembaharuan secara ilmiah bahwa kecenderungan wilayah inti terhadap wilayah hinterland tidak memberikan pengaruh kuat akibat kecenderungan berkembang pusat-pusat pelayanan di daerah hinterland, akan tetapi masih memiliki keterkaitan dalam konteks hubungan ruang wilayah hinterland dengan wilayah inti.

Dalam asumsi yang sama dengan Christaller, Lloyd (Location in space, 1977) melihat bahwa jangkauan/luas pelayanan dari setiap komoditas/fungsi itu ada batasnya yang dinamakan *range* dan ada batas minimal dari luas pelayanannya dinamakan *threshold* (Tarigan, 2006:79). Fakta dilapangan menunjukkan adanya *range* keruangan antara wilayah inti Kota Palopo sebagai pusat pelayanan terhadap daerah hinterland (Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara). Sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah Kota Palopo harus mempertimbangkan konektivitas sistem jaringan dan pelayanan fungsi perkotaan secara komprehensif.

Sejalan dengan pemikiran Martínez Toro, (2016) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan wilayah, jaringan pusat kota inti mempengaruhi pusat-pusat kota di daerah hinterland sebagai wilayah pengaruhnya. Artinya pengembangan wilayah inti Kota Palopo harus mempertimbangkan sistem pelayanan di wilayah hinterland (Kab. Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dominasi Kota Palopo (81,81%) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) masih relatif lemah, yang artinya bahwa fungsi Kota Palopo hingga saat ini belum optimal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau kawasan perkotaan yang berfungsi melayani skala/cakupan regional. kondisi fakta dilapangan menunjukkan bahwa daerah hinterland wilayah Kota Palopo meliputi Kab. Luwu, Kab. Luwu timur, dan Kab. Luwu Utara kecenderungan berkembang pusat-pusat pelayanan untuk melayani skala regional wilayah masing-masing sehingga skala pengaruh pusat pelayanan utama Kota Palopo tidak begitu memberikan pengaruh terhadap daerah sekitar. Sehingga setiap pusat pengembangan relatif akan tumbuh dan berkembang secara kohesif. Kondisi seperti ini dalam pengalokasian sumber-sumber pembangunan pada struktur ruang menjadi tidak efisien.
2. Dilihat luas jangkauan wilayah pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau pada radius sejauh 25,37 Km. Pengaruh Kota Palopo – Kab. Luwu Utara dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 67,67 Km. Sedangkan Luas Jangkauan Kota Palopo – Luwu Timur dengan jarak batas gaya tarik yang dimiliki hanya menjangkau Kab. Luwu Utara pada radius sejauh 94,30 Km. Semakin besar angka radius antar

Kota Palopo dengan Kab. Luwu Timur maka semakin erat hubungan interaksinya antara pusat pembangunan dengan daerah sekitarnya.

B. Rekomendasi

Dalam kaitan peran kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan kota hynterland (Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur) mendorong pembangunan daerah urban dan regional, beberapa saran dapat dikemukakan yakni :

1. Pembangunan kota pada daerah hynterland agar ditingkatkan dan diberikan perhatian yang lebih besar, yang dimaksudkan sebagai sarana dan sasaran untuk mengurangi atau menyerap arus urbanisasi dari daerah pedalaman ke Kota Palopo, misalnya dengan meningkatkan pembangunan industri yang berorientasi pada sumber bahan mentah dan sekolah – sekolah kejuruan yang sesuai agar dikembangkan di daerah hynterland.
2. Fungsi-fungsi pelayanan pada masing – masing kota menengah perlu ditingkatkan, yaitu menyediakan fasilitas permukiman, lapangan kerja, transportasi dan rekreasi (wisma, karya, marga, dan suka) termasuk fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial yang cukup (kuantitas) dan memadai (kualitas) bagi penduduk perkotaan yang dimaksudkan memberikan kemudahan dan kenyamanan, dengan demikian mendorong warga kotanya tidak pindah ke kota lain.
3. Mendorong saling keterkaitan antara kota utama dengan ibukota-ibukota kabupaten lainnya, yaitu peningkatan fasilitas prasarana dan sarana (angkutan) jalan raya untuk mendorong pengembangan keterkaitan antar kota sampai ke

pelosok daerah dalam lingkup Sulawesi Selatan maupun antar provinsi (misalnya Palopo – hynterland Bastem Kab. Luwu, Palopo dengan kota – kota di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara melalui jalan darat). Angkutan laut (pelabuhan) yang melayani kegiatan bongkar muat barang sebaiknya ditingkatkan juga. Dengan meningkatnya sarana angkutan laut akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

4. diperlukan upaya yang intens dari Pemerintah Kota Palopo untuk melibatkan Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga terkait di pusat untuk mengambil peran secara berkelanjutan.
5. Dalam penelitian yang akan datang perlu mengkaji lebih mendalam mengenai hierarki fungsi pelayanan antar pusat pembangunan pengembangan di Kota Palopo dan Sekitarnya.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta.
- Adisasmita, R. 2013. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Makassar.
- Baja, S. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Andi. Yogyakarta.
- Bintarto, R. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. U.P. Spring. Yogyakarta
- ,1983. *Metoda Analisa Geografi*. LP3ESS.
- Boudeville, J.R. 1966. *Problems of Regional Economic Planning*. Edinburg University Press, Edinburg
- Christaller, W. 1933. *Central Place in South Germany*. Terjemahan Baskin, E.W., Englewoods Cliffs. New Jersey.
- Djoko Sujarto. 1970. *Beberapa Pengertian Pokok Mengenai Kota*. ITB. Bandung.
- Hadjisarosa, P. 1980. *Kunsep Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. ITB. Bandung.
- Hoover, 1977. *Introduction to Regional Economics*. Alfred A. Knopt, New York
- Jayadinata, T.J., 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. ITB. Bandung.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty. Yogyakarta.
- Kustur, R.H., 2001. *Dimensi Keruangan Kota (Teori dan Kasus)*. UIP. Jakarta.
- Kuncoro, M., 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kusumastanto, T., 2007. *Bahan Ajar Perencanaan Kota-Kota*. Tridoyo Online Journal (Online). <http://tridoyo.blogspot.com>.
- La Mahi, 2009. *Analisis Hierarki Pusat-Pusat Pelayanan pada Pewilayahan Pembangunan Di Kabupaten Muna*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Haluoleo. Kendari.

- Lee, Linda. 1979. *Factors Affecting Land Use Change at The Urban Rural Fringe*. In *Growth and Change : A Journal of Regional Development*, Vol. X, October.
- Morlok, E.K., 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga. Jakarta.
- Muta'ali, L., 2003. *Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Geografi Indonesia*. Vol 17, Maret : 33 – 51.
- Nas, PJM, 1979. *Kota di Dunia Ketiga*. Bhratara. Jakarta.
- Nia, Pontoh. K & Iwan Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. ITB. Bandung.
- Nelson, L. 1955. *Rural Sociologi*. American Book Company. New York.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta
- Reksomarnoto, Moerdiman. 2006. *Megapolitan Jabodetabekjur*. Pustaka Cerdasindo. Jakarta.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S. (ed). 2005. *Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21 : Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. YSS-URDI. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____, 2005, *Manajemen Kota ; Perspektif Spasial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

